

LAPORAN AKHIR TAHUN 2025

MANAJEMEN RISIKO DINAS SOSIAL





**LAPORAN AKHIR PENGELOLAAN RISIKO
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
JANUARI 2025 s/d DESEMBER 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018 Pasal pada pasal 13 disebutkan pada ayat (1) “ Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas; a) identifikasi Risiko, dan analisis Risiko; (3) Dalam rangka Penilaian Risiko Sebagaimana pada ayat (1); Pimpinan Instansi Menetapkan: a) Tujuan Instansi pemerintah; b) Tujuan pada tiap tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan penilaian risiko tahun 2025 yang selanjutnya diimplemetasikan oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan rencana tindak pengendalian Risiko yang telah disusun dan hasil pelaksanaan pegelolaan tersebut selanjutnya dilaporkan oleh UPR kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Pelaksanaan Pelaporan Pengelolaan Risiko Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Bupati nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada pasal 22 ayat (1) “Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko”. Ayat (2) Laporan Pengelolaan Risiko pada ayat (1) meliputi a. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko; b. Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan c. Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan. Selanjutnya ayat (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud ayat (2) hurup b. dilakukan secara triwulan dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan. Selanjutnya ayat (7) “Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah,

sedangkan tingkat perangkat daerah dan tingkat operasional dikoordinasikan oleh tingkat pejabat pimpinan tinggi, Selanjutnya dalam lampiran III, Kegiatan pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan pada tingkat perangkat daerah yaitu laporan Risiko dan pelaksanaan RTP pada tingkat strategis (entitas perangkat daerah) dan operasional yang ditangani perangkat daerah, berupa laporan triwulan, tahunan, serta laporan evaluasi pelaksanaan dan rekomendasi perbaikan kegiatan pengendalian setiap triwulan dan tahunan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan pelaporan ini, (Nama Dinas/Badan) sebagai UPR strategis perangkat daerah dan Kepala Dinas/Badan/Direktur/Camat selaku UPR Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Risiko Operasional Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara disampaikan Laporan berkala hasil pelaksanaan pengelolaan Risiko Periode Bulan Januari 2025 s/d Desember 2025 kepada Bupati Kutai Kartanegara, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan strategis dan operasional dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan pemerintah daerah.

1.2 Tujuan Pelaporan Pengelolaan Risiko:

Tujuan pelaporan Pelaporan Pengelolaan Risiko Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Memberikan informasi hasil identifikasi, analisis dan rencana tindak pengendalian Risiko, (RTP) Risiko sasaran strategis, program dan kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah tahun 2025
2. Memberikan informasi kejadian risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang telah dilaksanakan sasaran strategis, program dan kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.
3. Memberikan informasi tentang tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko sebagai indikator peringatan dini dan sebagai bahan data base keterjadian risiko.
4. Memberikan informasi mengenai kendala/hambatan pelaksanaan pengendalian risiko dan risiko sisa setelah pelaksanaan pengendalian sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.
5. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penanganan risiko lebih lanjut atas kejadian risiko sisa (*residual Risk*) sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.

1.3 Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 7):
5. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati Nomor : 56 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 56)

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Laporan Pengelolaan Risiko Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada pelaksanaan pengelolaan risiko Risiko strategis dan Risiko operasional sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II
PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

2..1 Konteks Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Konteks Manajemn Risiko mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

a. Visi dan Misi

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dirumuskan Visi sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia”

Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 Sebagai Berikut:

- 1) Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efesien Dan Melayani
- 2) Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya
- 3) Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- 4) Meningkatkan Kualitas Layanan Insfrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah
- 5) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

b. Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan, Indikator Tujuan dan target tujuan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Tabel berikut:

Tabel
Indikator Tujuan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Presentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	98 %

Sasaran strategis, indikator dan target tahun 2025 sesuai Tabel berikut :

Tabel Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama dan Target			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	98 %
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	74 (B)

c. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tahun anggaran 2025 telah ditetapkan program, kegiatan/sub kegiatan dengan indikator hasil (*output*) sesuai Tabel berikut:

Tabel Program, Kegiatan Indikator, Target dan Jumlah Anggaran					
No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator	Target	Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 (B)	14.900.500.981,00
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP	74 (B)	514.524.615,00
	(1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	288.726.055,00
	(2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	30.443.000,00
	(3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	68.031.500,00
	(4)	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Data	30.586.200,00
	(5)	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	80.588.660,00
	(6)	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	16.149.200,00
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan pada Dinas Sosial	12 Bulan	11.455.839.804,00

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator	Target	Anggaran
	(1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1658 Orang/Bulan	11.193.095.490,00
	(2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	102.113.200,00
	(3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	143.585.060,00
	(4)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	17.046.054,00
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	6 Dokumen	121.140.500,00
	(1)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	12.500.000,00
	(2)	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	25.000.000,00
	(3)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	36.900.000,00
	(4)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	46.740.500,00
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	2 Dokumen	19.364.800,00
	(1)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	19.364.800,00
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan	744.861.401,00
	(1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.110.200,00
	(2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	64.774.506,00
	(3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	155.886.225,00
	(4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	339.194.710,00
	(5)	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	61.802.500,00
	(6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	94.551.660,00
	(7)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	13.541.600,00
	(8)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator	Target	Anggaran
		Berbasis Elektronik pada SKPD			
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	101.439.134,00
	(1)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	101.439.134,00
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.312.888.327,00
	(1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.299.000,00
	(2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	316.485.288,00
	(3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	994.104.039,00
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial	100 %	630.442.400,00
	(1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	150.000.000,00
	(2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	150.000.000,00
	(3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	75.000.000,00
	(4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Dipelihara	2 Unit	227.412.400,00
	(5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	28.030.000,00
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	92 %	5.149.768.480,00
	1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga atau Perorangan peserta Sosialisasi	50 Orang	16.006.900,00
	(1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	16.006.900,00
	2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	317 Orang	5.133.761.580,00
	(1)	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	176.983.200,00
	(2)	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan	20 Orang	127.967.700,00

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator	Target	Anggaran
			Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		
		(3)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	237 Lembaga	4.804.084.600,00
		(4)	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	24.726.080,00
III	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan	100 %	24.809.200,00
	1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	100 Orang	24.809.200,00
		(1)	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Penerima Layanan	100 Orang	24.809.200,00
IV	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 %	4.441.865.290,00
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	1180 Orang	4.004.515.580,00
		(1)	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	820 Orang	3.113.579.020,00
		(2)	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Layanan	200 Orang	28.006.400,00
		(3)	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Layanan	50 Orang	443.848.400,00
		(4)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	153.457.160,00
		(5)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	176.216.200,00
		(6)	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	43.087.000,00
		(7)	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	46.321.400,00

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator	Target	Anggaran
	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	344 Orang	437.349.710,00
	(1)	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	63.077.700,00
	(2)	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	194.159.500,00
	(3)	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	25.649.160,00
	(4)	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	26.514.150,00
	(5)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	36.480.000,00
	(6)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	59.866.000,00
	(7)	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dok	31.603.200,00
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	100 %	5.085.831.650,00
			Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	97,83 %	
	1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Anak Terlantar yang Terpelihara	25 Orang	1.099.896.400,00
	(1)	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penerima Layanan	25 Orang	1.099.896.400,00
	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen / data fakir miskin	2 Dok	3.985.935.250,00
	(1)	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	175.209 Orang	147.997.400,00
	(2)	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	65.403 Keluarga	142.499.250,00
	(3)	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang	1500 Orang	3.657.256.200,00
	(4)	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Penerima Bantuan	30 Orang	38.182.400,00
VI	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi	100 %	1.575.822.090,00

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator	Target	Anggaran
			kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten		
	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial penerima perlindungan Sosial	1500 Orang	1.275.822.090,00
	(1)	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	725.822..090,00
	(2)	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	400.000.000,00
	(3)	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Unit	75.000.000,00
	(4)	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	75.000.000,00
	2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan Bencana	4 Desa	300.000.000,00
	(1)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Kampung	0,00
	(2)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	23 orang	300.000.000,00
VII	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase TMP yang dikelola	100 %	1.774.204.000,00
	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara	2 Makam	1.774.204.000,00
	(1)	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.474.204.000,00
	(2)	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	91 Makami	300.000.000,00
		Jumlah			32.952.801.691,00

d. Unit Pemilik Risiko (UPR)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pengelolaan Risiko pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara,

dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-12//SET.1/100.1.2/03/2025 tanggal 14 Maret 2025 dengan Susunan Pelaksana Unit Pemilik Risiko /Tim Manajemen Risiko sebagai berikut:

Tabel
Susunan Pelaksana Unit Pemilik Risiko/Tim Manajemen Risiko

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Tim
1	Drs. Yuliandris Suherdiman 10680708 199403 1 013	Plt. Kepala Perangkat Daerah	Penanggung Jawab / Ketua UPR Esselon II
2	Drs. Yuliandris Suherdiman 19680708 199403 1 013	Sekretaris	Ketua Tim Kerja / Ketua UPR Eselon III Bidang Sekretariat
3	Sunarko, S.ST., M.Si 19710907 199401 1 002	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan	Assesor 1/ Anggota Tim Kerja SPIP dan Ketua UPR Esselon III Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan
4	Riadi Hadiwinoto, S.Hut 19681221 200312 1 002	Kepala Bidang Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Assesor 2 / Anggota Tim Kerja SPIP dan Ketua UPR Esselon III Bidang Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
5	Lucy Yulidasari, M.Psi 19750717 200801 2 028	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Assesor 3 / Anggota Tim Kerja SPIP dan Ketua UPR Esselon III Bidang Pemberdayaan Sosial
6	Ahmad Fahruji, ST., MM 19781208 200902 1 001	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminian Sosial	Assesor 4 / Anggota Tim Kerja SPIP dan Ketua UPR Esselon III Bidang Perlindungan dan Jaminian Sosial
7	Zein Wahyudi Pasa, SP 19730928 200112 1 003	Perencana Muda	Assesor 5 / Anggota Tim Kerja SPIP Bidang Sekretariat
8	Serapul Anam, SE., MM 19681011 199403 1 007	Kasub Bag Umum Tatalaksana dan Kepegawaian	Anggota Tim Kerja
9	Mohd. Ery Faisyal, S.Sos., M.Si 19790516 200112 1 001	Analisis SDM Aparatur	Anggota Tim Kerja
10	Muhammad Syafii 19860521 201001 1 013	Pengadministrasi Perkantoran	Admin Sekretariat
11	M. Mawardi 19790908 200902 1 001	Pengadministrasi Perkantoran	Admin Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
12	Akhmad Rifani, S.Sos., M.Si 19810813 200804 1 013	Penyuluh Sosial Muda	Admin Bidang Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Tim
13	Aris Teguh Rahayu, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Admin Bidang Pemberdayaan Sosial
14	H. Mohammad Erwinsyah, SE 19821215 200212 1 003	Pekerja Sosial Muda	Admin Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas Unit Pemilik Risiko (UPR) /Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- 1) melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- 2) melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- 3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.
- 4) Menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- 5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
- 6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian Risiko.

2.2. Pengendalian Intern Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan Risiko Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara telah disusun Kriteria Efektivitas Pengendalian Intern pada Standar Operasional Prosedur untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan kriteria sebagai beriku:

a. Kriteria Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Tabel
Kriteria Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Deskripsi	Kriteria		Keefektifan
	Desain	Operasional	
Kontrol bersifat preventif, dapat dioperasikan dan dilaksanakan secara konsisten. Perlu dipantau karena terpengaruh perubahan kondisi	Ya	Ya	Efektif
Kontrol mencakup sebagian dari kebutuhan. Jika desain bagus operasional sebagian	Ya Tidak	Tidak Ya	Sebagian efektif

Baik desain maupun operasional dari kontrol yang ada tidak memadai. Perlu didesain ulang untuk perbaikan atau ganti baru.	Tidak	Tidak	Tidak efektif.
---	-------	-------	----------------

b. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri 3 komponen, yaitu skala kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko, skala dampak risiko, dan skala tingkat risiko (nilai risiko).

c. Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko

Tabel
Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 – 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (sebesar 31 – 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 5 Tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10% atau 1 kali dalam 5 Tahun)

d. Skala Dampak Risiko

Tabel
Skala Dampak Risiko

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan	Tuntutan Hukum
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian negara ≤ Rp1 Juta	Keluhan <i>Stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5 kali dalam satu Periode

Minor (2)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp1 Juta s.d Rp5 Juta	Keluhan <i>Stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali dalam satu periode
Moderat (3)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp5	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali
Signifikan (4)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp10 Juta s.d	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp. 50	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja ≤ 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali

e. Skala Penerimaan Nilai Risiko

Tabel
Skala Nilai Penerimaan Risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko (<i>Risk Appetite</i>)
1-2 (Sangat Rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
6-9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12-16 (Sangat Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik
20-25 (Dahsyat)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik
Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko (<i>Risk Tolerance</i>)
1-5 (Sangat Rendah)	Dapat diterima
6-10 (Rendah)	Dapat diterima
11-15 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
16-20 (Sangat Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik
21-25 (Dahsyat)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik

f. Kriteria Tingkat Risiko

Gambar
Matriks Tingkat Risiko

Matriks Risiko					
≤ 5	5	10	15	20	25

	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

Pengelompokan Prioritas Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara :

Tabel
 Pengelompokaan prioritas Tingkat Risiko

Skala	Warna	Tingkat	Prioritas
1 -5	Hijau	Sangat Rendah	5
6 – 8	Hijau Muda	Rendah	4
9 – 12	Kuning	Sedang	3
15 – 20	Jingga	Tinggi	2
20 - 25	Merah	Sangat Tinggi	1

g. Kriteria Tingkat Risiko Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel
 Pemetaan Tingkat Risiko, selera Risiko, Toleransi Risiko dan Eskalasi Tindakan

Tingkat Risiko		Selera Risiko	Toleransi Risiko	Tindakan Eskalasi
Sangat Tinggi		Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian terutama tindakan responsif.	Risiko tidak dapat diterima dan ditoleransi dan perlakuan risiko perlu dikaji ulang untuk perbaikan atau penambahan perlakuan atau ganti yang baru.	Perlu perhatian Dewan Pengawas organisasi dan Pengendalian dapat dieskalasi kepemimpinan organisasi dan didukung dengan rencana penanganan terinci.
Tinggi		Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian baik preventif maupun respontif.		Perlu perhatian pimpinan oganisasi, pengendalian eskalasi kepemimpinan manajemen senior organisasi dan didukung rencana rinci
Sedang tinggi		Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian terutama tindakan preventif.		Pengendalian dieskalasi ke manajer senior selaku pemilik risiko dan didukung dengan rencana rinci.
Sedang rendah		Risiko tidak dapat diterima, namun perlakuan pengendalian hanya dilakukan jika manfaat yang diterima lebih besar dari biayanya	Risiko tidak dapat diterima tapi dapat ditoleransi sepanjang secara praktek menguntungkan.	Pengendalian cukup dengan Manajer Bidang sesuai dengan kebijakan dan SOP yang berlaku.

Tingkat Risiko		Selera Risiko	Toleransi Risiko	Tindakan Eskalasi
Rendah		Risiko dapat diterima sehingga tidak perlu perlakuan, cukup kontrol yang ada, tapi perlu dimonitor oleh pemilik risiko.	Risiko dapat diterima dan ditoleransi sehingga tidak perlu perlakuan, cukup dengan kontrol yang ada dan dimonitor oleh pemilik risiko.	Pertahankan pengendalian yang ada dan monitor tingkat keterjadian risiko untuk perlakuan risiko.

BAB III

HASIL PENILAIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO

1.1 Unit Pemilik Risiko Eselon II

3.1.1 (Nama Jabatan)

Nama Pejabat : Drs. Yuliandris Suherdiman

NIP : 19680708 199403 1 013

a. Sasaran strategis yang dikelola eselon II

Sasaran Strategis Eselon II sesuai Tabel berikut:

Tabel				
Sasaran Strategis, Indikator, Target dan anggaran UPR Eselon II				
No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	98 %	32.952.801.691,00
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	74 (B)	

b. Identifikasi Risiko Strategis

Hasil Identifikasi Risiko Strategis sesuai Tabel berikut:

Tabel								
Hasil identifikasi Risiko Sasaran Strategis								
No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar							
1.1	Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	RS1	Data PMKS tidak terverifikasi dan valid	Keterbatasan kemampuan Sumber Daya yang dimiliki Dinas Sosial	Internal & Eksternal	UC/C	Rendahnya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar kepada PMKS	Kepala Dinas / PMKS
1.2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	RS 2	Penyusunan LKjIP yang belum memenuhi standar untuk pencapaian	Perubahan manajemen kinerja yang sangat cepat	Internal	C	Tidak tercapainya nilai SAKIP yang menjadi target Dinas Sosial	Kepala Dinas / ASN Dinas Sosial

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			nilai yang ditargetkan	dengan berbagai instrumen penilaian yang ada sementara OPD memiliki SDM yang terbatas karena sudah banyak yang Purna Tugas				

c. Analisi Risiko Strategis

Hasil Analisis Risiko Strategis sesuai Tabel berikut:

Tabel
Hasil Analisis Risiko Strategis

Kode Risiko.	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko				Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor	Kategori/ peringkat risiko		Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
RS 1	Data PMKS tidak terverifikasi dan valid disebabkan oleh Keterbatasan kemampuan Sumber Daya yang dimiliki Dinas Sosial	5	4	20	Sangat Tinggi	Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Kebutuhan Pelayanan Dasar PMKS	Memadai	Efektif	Ada
RS 2	Penyusunan LKjIP yang belum memenuhi standar untuk pencapaian nilai yang ditargetkan disebabkan oleh Perubahan manajemen kinerja yang sangat cepat dengan berbagai instrumen penilaian yang ada sementara OPD memiliki SDM yang terbatas karena sudah banyak yang Purna Tugas	4	4	16	Tinggi	Menugaskan PNS yang berkompeten untuk mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	Memadai	Efektif	Ada

d. Hasil Evaluasi Risiko Strategis eselon II sebagai berikut:

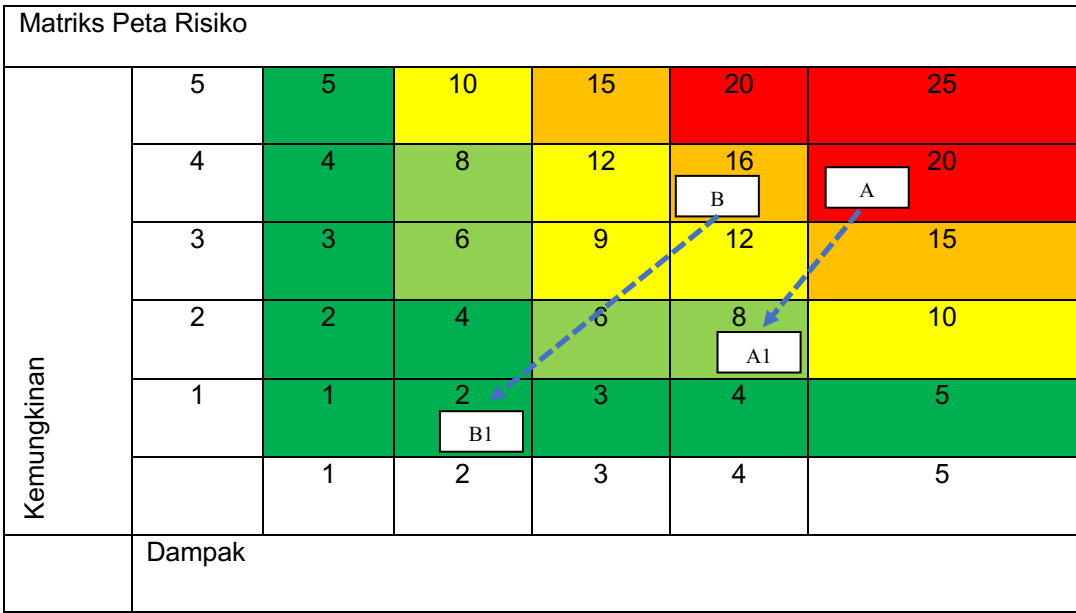
Tabel

Hasil Evaluasi Risiko Strategis

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Risiko	Peringkat Risiko	Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/ Dihindari/Dibagi)	Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko			
							Setelah Pengendalian			
							Kemungkinan	Dampak	Skor	Level risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RS 1	Data PMKS tidak terverifikasi dan valid disebabkan oleh Keterbatasan kemampuan Sumber Daya yang dimiliki Dinas Sosial	20	Sangat Tinggi	1	Mitigasi	Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Kebutuhan Pelayanan Dasar PMKS	2	4	8	Rendah
RS 1	Penyusunan LKjIP yang belum memenuhi standar untuk pencapaian nilai yang ditargetkan disebabkan oleh Perubahan manajemen kinerja yang sangat cepat dengan berbagai instrumen penilaian yang ada sementara OPD memiliki SDM yang terbatas karena sudah banyak yang Purna Tugas	16	Tinggi	2	Diterima	Menugaskan PNS yang berkompeten untuk mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	1	2	2	Sangat Rendah

e. Pemetaan Penanganan Risiko Strategis

Gambar
Matriks Pemetaan Penanganan Risiko Strategis



Ket. A = RS 1 (sebelum penanganan Risiko)
 A1 = RS 1 (setelah penanganan Risiko)

- B = RS 2 (sebelum penanganan Risiko)
B1 = RS2 (setelah penanganan Risiko)

- f. Perlakuan dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko
- Perlakukan (respon) dan rencana tindak pengendalian risiko strategis eselon II sesuai Tabel berikut:

Tabel
Rencana Tindak Pengendalian Risiko Strategis

Kode Risiko	Risiko	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RS1	Data PMKS tidak terverifikasi dan valid disebabkan oleh Keterbatasan kemampuan Sumber Daya yang dimiliki Dinas Sosial	Mitigasi	Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Kebutuhan Pelayanan Dasar PMKS	Januari s/d Desember 2025	-Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin -Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial -Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial -Bidang Rehabilitasi Sosial
RS2	Penyusunan LKjIP yang belum memenuhi standar untuk pencapaian nilai yang ditargetkan disebabkan oleh Rendahnya kemampuan ASN Dinas Sosial dalam meng-implementasikan SAKIP	Diterima	Menugaskan PNS yang berkompeten untuk mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja		-Sekretaris

- g. Pemantauan Risiko
- Pemantauan Pelaksanaan Rencana Tidak Pengendalian Risiko Strategis sesuai Tabel berikut:

Tabel
Pemantauan RTP Risiko Strategis eselon II

No	Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(5)	(16)
1	Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada petugas lapangan terkait entry data / updating data pada aplikasi SIKS-NG / DTSEN ; Memberikan Rewards kepada petugas pendata dan pengelolaan data													-Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial -Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial -Bidang Rehabilitasi Sosial	-Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial -Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial -Bidang Rehabilitasi Sosial
2	Melakukan rapat monitoring evaluasi dan pengendalian														

Keterangan : (Warna Hijau rencana pelaksanaan)
(Warna Kuning Realisasi pelaksanaan)

h. Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pengendalian Risiko
Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pengendalian Risiko strategis eselon II
sesuai Tabel berikut:

Tabel
Pelaksanaan Pengendalian Risiko Strategis Tahun 2025

No.	Rencana Tindak Pengendalian Risiko	Tanggal Pelaksanaan	Keterjadian Risiko (Ya/Tidak)	Bentuk Output Kegiatan pengendalian (No Surat/No	Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan pengendalian/ Risiko Sisa yang belum dapat dikendalikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Kebutuhan Pelayanan Dasar PMKS		Tidak	SOP Pelayanan Dasar PMKS	-
2	Menugaskan PNS yang berkompeten untuk mengikuti sosialisasi,	5 s/d 11 Maret 2025	Tidak	ASN memiliki sertifikat pengembangan kompetensi	-

No.	Rencana Tindak Pengendalian Risiko	Tanggal Pelaksanaan	Keterjadian Risiko (Ya/Tidak)	Bentuk Kegiatan Output pengendalian (No Surat/No	Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan pengendalian/ Risiko Sisa yang belum dapat dikendalikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	bimbingan teknis penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja			perencanaan dan pelaporan kinerja	

i. Progres Capaian Sasaran Strategis

Progres Capaian indikator sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Akhir Tahun 2025

Tabel

Capaian Indikator Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Sasaran Strategis	Target Tahun 2025		Realisasi Target		% Capaian
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Penanganan Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	98,00 %	32.952.801.691,-	0 %	28.105.167.256 ,-	85,29 %
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	74 (B)		-		100 %

3.2. Unit Pengelola Risiko (UPR) Eselon III

3.2.1 Sekretariat

Nama Pejabat : Drs. Yuliandris Suherdiman

NIP : 19680708 199403 1 013

a. Program dan kegiatan yang dikelola sesuai Tabel berikut:

Tabel

Sasaran Strategis, Indikator, Target dan Anggaran

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator	Target	Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 (B)	14.900.500.981,00
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP	74 (B)	514.524.615,00
		(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	288.726.055,00
		(2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	30.443.000,00
		(3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	68.031.500,00
		(4) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Data	30.586.200,00
		(5) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	80.588.660,00
		(6) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	16.149.200,00
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan pada Dinas Sosial	12 Bulan	11.455.839.804,00
		(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1658 Orang/Bulan	11.193.095.490,00
		(2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	102.113.200,00
		(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	143.585.060,00
		(4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	17.046.054,00
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	6 Dokumen	121.140.500,00
		(1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	12.500.000,00
		(2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik	1 Laporan	25.000.000,00

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator	Target	Anggaran
			Daerah SKPD		
	(3)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	36.900.000,00
	(4)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	46.740.500,00
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	2 Dokumen	19.364.800,00
	(1)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	19.364.800,00
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan	744.861.401,00
	(1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.110.200,00
	(2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	64.774.506,00
	(3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	155.886.225,00
	(4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	339.194.710,00
	(5)	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	61.802.500,00
	(6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	94.551.660,00
	(7)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	13.541.600,00
	(8)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	101.439.134,00
	(1)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	101.439.134,00
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.312.888.327,00
	(1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.299.000,00
	(2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	316.485.288,00
	(3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	994.104.039,00
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial	100 %	630.442.400,00
	(1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	150.000.000,00

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator	Target	Anggaran
			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
		(2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	150.000.000,00
		(3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	75.000.000,00
		(4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Dipelihara	2 Unit	227.412.400,00
		(5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	28.030.000,00

b. Hasil Identifikasi Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel
Hasil identifikasi Risiko Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RPROG 1	Penyusunan LKjIP yang belum memenuhi standar untuk pencapaian nilai yang ditargetkan	Rendahnya kemampuan ASN Dinas Sosial dalam meng-implementasi-kan SAKIP	Internal	C	Tidak tercapainya nilai SAKIP yang menjadi target Dinas Sosial	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUBK 1	Terlambatnya penyelesaian Dokumen Perencanaan	Bahan dan Data untuk penyusunan dokumen belum tersedia	Internal	C	Bahan dan Data untuk penyusunan dokumen belum tersedia	Sekretaris / PPTK
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUBK 2	Laporan SAKIP, E-Pantau, LPPD belum dapat di nilai dengan baik	Kurangnya Koordinasi Antar Bidang	Internal	C	Laporan Capaian Realisasi Kegiatan SKPD Tidak Maksimal	Sekretaris / PPTK
1.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUBK 3	Laporan SAKIP, Manajemen Risiko, E-Pantau, LPPD belum dapat di nilai dengan baik disebabkan oleh	Kurangnya Koordinasi Antar Bidang	Internal	C	Laporan Capaian Realisasi Kegiatan SKPD Tidak Maksimal	Sekretaris / PPTK

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
			Kurangnya Koordinasi Antar Bidang					
1.1.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	RSUBK 4	Validitas dan kualitas data sektoral yang masih rendah	Data statistik sektoral tidak akurat dan tidak mutakhir	Internal	C	Data statistik sektoral tidak akurat dan tidak mutakhir	Sekretaris / PPTK
1.1.5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	RSUBK 5	Tidak tersedianya data sektoral	Data statistik sektoral tidak akurat dan tidak mutakhir	Internal	C	Data statistik sektoral tidak akurat dan tidak mutakhir	Sekretaris / PPTK
1.1.6	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUBK 6	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Kurang optimalnya sinergitas dan kolaborasi antar stakeholder dalam perencanaan pembangunan	Internal/Eksternal	UC/C	Belanja pembangunan yang tidak efektif dan efisien	Sekretaris / PPTK
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUBK 7	Gaji dan Tunjangan ASN yang tidak terbayarkan	Adanya Penambahan Pegawai, Perubahan	Internal dan Eksternal	UC/C	Menurunnya kinerja ASN	Sekretaris / PPTK

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
				Regulasi dan Hilangnya data Base Pegawai /ASN				
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUBK 8	Terlambatnya penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun	Proses penyelesaian penatausahaan keuangan yang tidak tepat waktu	Internal	C	Terlambatnya penyusunan LKPJ dan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerinrah Daerah	Sekretaris / PPTK
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	RSUBK 9	Laporan Berkala Belum Memberikan Keyakinan Yang Wajar	Laporan Terlambat Dikumpulkan	Internal	C	Pemerintah Daerah Kesulitan Konsolidasi Laporan Keuangan	Sekretaris / PPTK
1.2.4	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUBK 10	Terjadinya SILPA dan atau Kekurangan Pembayaran untuk belanja	Terjadinya SILPA dan atau Kekurangan Pembayaran untuk belanja	Internal	C	Penyerapan APBD yang tidak optimal	Sekretaris / PPTK
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	RSUBK 11	Laporan BMD yang tidak valid	Asset yang tidak tercatat	Internal	C	Pemerintah Daerah Kesulitan Konsolidasi Laporan Keuangan	Sekretaris / PPTK
1.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	RSUBK 12						

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
1.3.3	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUBK 13	Laporan BMD yang tidak valid	Asset yang tidak tercatat	Internal dan Eksternal	UC/C	Pemerintah Daerah Kesulitan Konsolidasi Laporan Keuangan	Sekretaris / PPTK
1.3.4	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUBK 14	Laporan BMD yang tidak valid	Asset yang tidak tercatat	Internal dan Eksternal	UC/C	Pemerintah Daerah Kesulitan Konsolidasi Laporan Keuangan	Sekretaris / PPTK
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1.4.1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	RSUBK 15	Data ASN yang tidak update	Belum semua data ASN terkumpul menjadi database	Internal	C	Tidak dapat meningkatkan SDM	Sekretaris / PPTK
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RSUBK 16	Pencahayaan ruangan kerja dan lingkungan kantor tidak baik	Tidak tersedia komponen instalasi listrik dan penerangan	Internal	C	Tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik	Sekretaris / PPTK
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUBK 17	Kemampuan OPD yang belum dapat memenuhi kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	Internal	C	Tidak terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Sekretaris / PPTK
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RSUBK 18	Kurang terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta	Internal	C	Tidak terpenuhinya Logistik Kantor	Sekretaris / PPTK

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
				keterlambatan belanja bahan logistik yang dibutuhkan				
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	RSUBK 19	Tidak terpenuhinya semua Barang Cetak dan Penggandaan	Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	Internal	C	Tidak terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	Sekretaris / PPTK
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	RSUBK 20	Tidak terpenuhinya kebutuhan bahan / material pendukung kegiatan	Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan material yang dibutuhkan	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan acara yang memerlukan bahan / material	Sekretaris / PPTK
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUBK 21	Perjalanan dinas yang tidak efisien dan efektif	Perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan	Internal	C	Pemborosan penggunaan anggaran	Sekretaris / PPTK
1.5.7	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	RSUBK 22	Kehilangan dokumen arsip yang diperlukan	Tidak tertatanya arsip pada dinas sosial	Internal	C	Kesulitan dalam pencarian dokumen arsip yang diperlukan	Sekretaris / PPTK
1.5.8	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	RSUBK 23	Rendahnya kualitas pelayanan	Kurangnya sumber daya yang dimiliki	Eksternal dan Internal	UC	Menurunnya Nilai IKM Dinas Sosial	Sekretaris / PPTK
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUBK 24	Tidak terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin penunjang tugas dan fungsi dinas	Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	Internal	C	Tidak maksimalnya kinerja ASN	Sekretaris / PPTK
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSUBK 25	Terlambatnya proses administrasi yang membutuhkan meterai, dll	Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta ketersediaan anggaran belanja jasa surat menyurat yang tidak sesuai	Internal	C	Terhambatnya proses surat-menyurat kantor	Sekretaris / PPTK
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUBK 26	Sanksi Denda / Pemutusan sambungan air, listrik, telepon / internet dan TV kabel	Keterlambatan pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internal	C	Terhambatnya aktivitas / pelayanan / kebutuhan kantor	Sekretaris / PPTK
1.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUBK 27	Kekurangan pagu anggaran pembayaran gaji THL	Adanya penambahan tenaga harian lepas wakar dan tenaga kebersihan	Internal	C	Kinerja Pegawai Non PNS Kurang Maksimal	Sekretaris / PPTK
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	RSUBK 28	Terhambatnya aktivitas pengguna kendaraan	Pemeliharaan kerusakan yang	Internal	C	Minimnya Kendaraan Dinas Jabatan untuk menunjang Tufoksi OPD	Sekretaris / PPTK

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dinas perorangan dan jabatan	tidak dapat diprediksi				
1.8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUBK 29	Tidak maksimalnya pelayanan di lapangan	Kendaraan dinas operasional / lapangan yang tidak terpelihara	Internal	C	Minimnya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk menunjang Tufoksi OPD	Sekretaris / PPTK
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUBK 30	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan peralatan / mesin	Peralatan dan mesin yang tidak dipelihara/dirawat	Internal	C	kerusakan peralatan dan mesin	Sekretaris / PPTK
1.8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUBK 31	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan sarana / prasarana	Sarana dan prasarana yang tidak dipelihara/dirawat	Internal	C	kerusakan sarana dan prasarana Gedung kantor	Sekretaris / PPTK

c. Hasil Analisis Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut

Tabel
Hasil Analisis Risiko Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
RPROG 1	Penyusunan LKjIP yang belum memenuhi standar untuk pencapaian nilai yang ditargetkan	4	4	16	Tinggi	Menugaskan PNS yang berkompeten untuk mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	Memadai	Efektif	Ada
RSUBK 1	Terlambatnya penyelesaian Dokumen Perencanaan disebabkan oleh Bahan dan Data untuk penyusunan dokumen belum tersedia	2	3	6	Rendah	1. Melakukan reuiu RENJA. 2. Penyusunan KAK. 3. Mengikuti regulasi terkait perencanaan	Memadai	Efektif	Ada
RSUBK 2	Laporan Sakip, E-Pantau, LPPD belum dapat di nilai dengan baik disebabkan oleh Kurangnya Koordinasi Antar Bidang	2	3	6	Rendah	Rapat pengendalian kinerja internal Dinas Sosial	Memadai	Efektif	Ada
RSUBK 3	Gaji dan Tunjangan ASN yang tidak terbayarkan disebabkan oleh Adanya Penambahan Pegawai, Perubahan Regulasi dan Hilangnya data Base Pegawai /ASN	2	3	6	Rendah	Koordinasi dengan BPKAD dalam rangka rekonsiliasi gaji dan tunjangan ASN	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 4	Laporan Berkala Belum Memberikan Keyakinan Yang Wajar disebabkan oleh Laporan Terlambat Dikumpulkan	2	3	6	Rendah	Rapat evaluasi internal	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 5	Laporan BMD yang tidak valid disebabkan oleh Asset yang tidak tercatat	3	4	12	Sedang	Penyusunan rekapitulasi belanja modal yang menjadi asset Dinas Sosial per triwulan	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 6	Data ASN yang tidak update disebabkan oleh Belum semua data ASN terkumpul menjadi database	3	4	12	Sedang	Memaksimalkan penggunaan aplikasi My SAPK	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 7	Pencahayaan ruangan kerja dan lingkungan kantor tidak baik disebabkan oleh Tidak tersedia komponen instalasi listrik dan penerangan	2	2	4	Sangat Rendah	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 8	Kemampuan OPD yang belum dapat memenuhi kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	3	3	9	Rendah	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Memadai	Efektif	Tidak Ada

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
RSUBK 9	Kurang terpenuhinya Bahan Logisti Kantor disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan logistik yang dibutuhkan	2	2	4	Sangat Rendah	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 10	Tidak terpenuhinya semua Barang Cetakan dan Penggandaan disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	2	2	2	Sangat Rendah	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 11	Tidak terpenuhinya kebutuhan bahan / material pendukung kegiatan disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan material yang dibutuhkan	2	2	2	Sangat Rendah	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 12	Perjalanan dinas yang tidak efisien dan efektif disebabkan oleh Perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan	3	3	9	Rendah	Membuat kartu kendali perjalanan dinas	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 13	Kehilangan dokumen arsip yang diperlukan disebabkan oleh Tidak tertatanya arsip pada dinas sosial	3	4	12	Sedang	Pendampingan dari Dinas Kearsipan dalam pengelolaan arsip	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 14	Tidak terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin penunjang tugas dan fungsi dinas disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	3	4	12	Sedang	Membuat Rencana Kebutuhan Barang dan Mesin	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 15	Terlambatnya proses administrasi yang membutuhkan meterai, dll disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta ketersediaan anggaran belanja jasa surat menyurat yang tidak sesuai	2	2	4	Sangat Rendah	Penggunaan bahan surat dan benda pos secara efisien	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 16	Sanksi Denda / Pemutusan sambungan air, listrik, telepon / internet dan TV kabel disebabkan oleh Keterlambatan pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	4	16	Tinggi	Melakukan perhitungan ulang kebutuhan sampai akhir tahun	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 17	Kekurangan pagu anggaran pembayaran gaji THL disebabkan oleh Adanya penambahan tenaga harian lepas wakar dan tenaga kebersihan	3	4	12	Sedang	Memastikan ketersediaan dana untuk pembayaran gaji THL	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 18	Terhambatnya aktivitas pengguna kendaraan dinas perorangan dan jabatan disebabkan oleh Pemeliharaan kerusakan yang tidak dapat diprediksi	4	3	12	Sedang	Membuat kartu kendali perbaikan / perawatan kendaraan	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 19	Tidak terpenuhinya semua Barang Cetakan dan Penggandaan disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	4	3	12	Sedang	Tanda terima penyerahan barang cetakan	Memadai	Efektif	Tidak Ada

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
RSUBK 20	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan peralatan / mesin disebabkan oleh Peralatan dan mesin yang tidak dipelihara/dirawat	4	3	12	Sedang	Menginventarisir kebutuhan bahan material secara selektif agar efektif dan efisien	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 21	Perjalanan dinas yang tidak efisien dan efektif disebabkan oleh Perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan	4	3	12	Sedang	Menginventarisir kebutuhan bahan material secara selektif agar efektif dan efisien	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 22	Kehilangan dokumen arsip yang diperlukan disebabkan oleh Tidak tertatanya arsip pada dinas sosial	4	3	12	Sedang	Menyusun arsip dokumen sesuai dengan kodefikasi dan mengamankannya dari gangguan alam dan manusia.	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 23	Tidak terlaksanannya sistem pemerintahan berbasis elektronik disebabkan oleh Keterbatasan sumber daya yang ada	4	3	12	Sedang	Membuat aplikasi berbasis website	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 24	Tidak terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin penunjang tugas dan fungsi dinas disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	4	3	12	Sedang	Rapat evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 25	Terlambatnya proses administrasi yang membutuhkan meterai, dll disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta ketersediaan anggaran belanja jasa surat menyurat yang tidak sesuai	4	3	12	Sedang	Melakukan efisiensi dalam proses surat menyurat	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 26	Sanksi Denda / Pemutusan sambungan air, listrik, telepon / internet dan TV kabel disebabkan oleh Keterlambatan pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	3	12	Sedang	Melakukan perhitungan ulang kebutuhan pembayaran rekening sampai akhir tahun	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 27	Kekurangan pagu anggaran pembayaran gaji THL disebabkan oleh Adanya penambahan tenaga harian lepas wakar dan tenaga kebersihan	4	3	12	Sedang	Melakukan perhitungan ulang kebutuhan pembayaran gaji THL untuk diajukan tambahan pada P-APBD	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 28	Tidak maksimalnya pelayanan di lapangan disebabkan oleh Kendaraan dinas operasional / lapangann yang tidak terpelihara	4	3	12	Sedang	Membuat kartu kendali perbaikan / perawatan kendaraan	Memadai	Efektif	Tidak Ada

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
RSUBK 29	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan peralatan / mesin disebabkan oleh Peralatan dan mesin yang tidak dipelihara/dirawat	4	3	12	Sedang	Membuat kartu kendali perbaikan / perawatan peralatan dan mesin	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 30	Pelayanan ASN yang tidak optimal disebabkan oleh Tempat bekerja yang tidak nyaman	4	4	16	Tinggi	Surat kepada rekanan unrtuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak perjanjian	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 31	Pelayanan ASN yang tidak optimal disebabkan oleh Sarana/ prasarana gedung kantor yang tidak tepelihara	4	4	16	Tinggi	Surat kepada rekanan unrtuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak perjanjian	Memadai	Efektif	Tidak Ada

d. Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan Eselon III sebagai berikut:

Tabel
Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat	Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/ Dihindari/Dibagi)	Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko Setelah Pengendalian			
							K	D	Skor	Level risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RPROG 1	Penyusunan LKJIP yang belum memenuhi standar untuk pencapaian nilai yang ditargetkan	16	Tinggi	1	Mitigasi	Menugaskan PNS yang berkompeten untuk mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	4	4	16	Tinggi
RSUBK 21	Pelayanan ASN yang tidak optimal disebabkan oleh Sarana/ prasarana gedung kantor yang tidak tepelihara	16	Tinggi	1	Mitigasi	Surat kepada rekanan unrtuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak perjanjian	4	4	16	Tinggi
RSUBK 17	Kekurangan pagu anggaran pembayaran gaji THL disebabkan oleh Adanya penambahan tenaga harian lepas wakar dan tenaga kebersihan	12	Sedang	2	Mitigasi	Memastikan ketersediaan dana untuk pembayaran gaji THL	3	4	12	Sedang

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat	Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/ Dihindari/Dibagi)	Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko Setelah Pengendalian			
							K	D	Skor	Level risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RSUBK 14	Tidak terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin penunjang tugas dan fungsi dinas disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	12	Sedang	3	Mitigasi	Membuat Rencana Kebutuhan Barang dan Mesin	3	4	12	Sedang
RSUBK 18	Terhambatnya aktivitas pengguna kendaraan dinas perorangan dan jabatan disebabkan oleh Pemeliharaan kerusakan yang tidak dapat diprediksi	12	Sedang	4	Mitigasi	Membuat kartu kendali perbaikan / perawatan kendaraan	4	3	12	Sedang
RSUBK 19	Tidak maksimalnya pelayanan di lapangan disebabkan oleh Kendaraan dinas operasional / lapangann yang tidak terpelihara	12	Sedang	5	Mitigasi	Membuat kartu kendali perbaikan / perawatan kendaraan	4	3	12	Sedang
RSUBK 5	Laporan BMD yang tidak valid disebabkan oleh Asset yang tidak tercatat	12	Sedang	6	Mitigasi	Penyusunan rekapitulasi belanja modal yang menjadi asset Dinas Sosial per triwulan	3	4	12	Sedang
RSUBK 20	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan peralatan / mesin disebabkan oleh Peralatan dan mesin yang tidak dipelihara/dirawat	12	Sedang	7	Mitigasi	Membuat kartu kendali perbaikan / perawatan peralatan dan mesin	4	3	12	Sedang
RSUBK 6	Data ASN yang tidak update disebabkan oleh Belum semua data ASN terkumpul menjadi database	12	Sedang	8	Mitigasi	Memaksimalkan penggunaan aplikasi My SAPK	3	4	12	Sedang
RSUBK 13	Kehilangan dokumen arsip yang diperlukan disebabkan oleh Tidak tertatanya arsip pada dinas sosial	12	Sedang	9	Mitigasi	Pendampingan dari Dinas Kearsipan dalam pengelolaan arsip	3	4	12	Sedang
RSUBK 8	Kemampuan OPD yang belum dapat memenuhi kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	9	Rendah	10	Mitigasi	Melakukan inventarisasi kebutuhan	3	3	9	Rendah
RSUBK 12	Perjalanan dinas yang tidak efisien dan efektif disebabkan oleh Perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan	9	Rendah	11	Mitigasi	Membuat kartu kendali perjalanan dinas	3	3	9	Rendah

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat	Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/ Dihindari/Dibagi)	Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko Setelah Pengendalian			
							K	D	Skor	Level risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RSUBK 3	Gaji dan Tunjangan ASN yang tidak terbayarkan disebabkan oleh Adanya Penambahan Pegawai, Perubahan Regulasi dan Hilangnya data Base Pegawai /ASN	6	Sedang	12	Mitigasi	Koordinasi dengan BPKAD dalam rangka rekonsiliasi gaji dan tunjangan ASN	2	3	6	Rendah
RSUBK 4	Laporan Berkala Belum Memberikan Keyakinan Yang Wajar disebabkan oleh Laporan Terlambat Dikumpulkan	6	Rendah	13	Diterima	Rapat evaluasi internal	2	3	6	Rendah
RSUBK 1	Terlambatnya penyelesaian Dokumen Perencanaan disebabkan oleh Bahan dan Data untuk penyusunan dokumen belum tersedia	6	Rendah	14	Mitigasi	1. Melakukan reviu RENJA. 2. Penyusunan KAK. 3. Mengikuti regulasi terkait perencanaan	2	3	6	Rendah
RSUBK 2	Laporan Sakip, E-Pantau, LPPD belum dapat di nilai dengan baik disebabkan oleh Kurangnya Koordinasi Antar Bidang	6	Rendah	15	Mitigasi	Rapat pengendalian kinerja internal Dinas Sosial	2	3	6	Rendah
RSUBK 10	Tidak terpenuhinya semua Barang Cetakan dan Penggandaan disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	4	Sangat Rendah	16	Diterima	Melakukan inventarisasi kebutuhan	2	2	2	Sangat Rendah
RSUBK 9	Kurang terpenuhinya Bahan Logisti Kantor disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan logistik yang dibutuhkan	4	Sangat Rendah	17	Diterima	Melakukan inventarisasi kebutuhan	2	2	4	Sangat Rendah
RSUBK 11	Tidak terpenuhinya kebutuhan bahan / material pendukung kegiatan disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan material yang dibutuhkan	4	Sangat Rendah	18	Dierima	Melakukan inventarisasi kebutuhan	2	2	4	Sangat Rendah
RSUBK 7	Pencahayaan ruangan kerja dan lingkungan kantor tidak baik disebabkan oleh Tidak tersedia komponen instalasi listrik dan penerangan	4	Sangat Rendah	19	Dierima	Melakukan inventarisasi kebutuhan	2	2	4	Sangat Rendah
RSUBK 15	Terlambatnya proses administrasi yang membutuhkan meterai, dll disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak	4	Sangat Rendah	20	Dierima	Penggunaan bahan surat dan benda pos secara efesien	2	2	4	Sangat Rendah

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat	Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/ Dihindari/Dibagi)	Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko Setelah Pengendalian			
							K	D	Skor	Level risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	tepat serta ketersediaan anggaran belanja jasa surat menyurat yang tidak sesuai									

e. Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan

Gambar
Matriks Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan

Matriks Peta Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16A	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4A1	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

Ket. A = RPROG1 (sebelum penanganan Risiko)
 A1 = RPROGR1 (setelah penanganan Risiko)

f. Respon dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko

Respon dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Program dan Kegiatan eselon III sesuai dengan Tabel berikut:

Tabel
Rencana Tindak Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan/sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RPROG 1	Penyusunan LKjIP yang belum memenuhi standar untuk pencapaian nilai yang ditargetkan	Mitigasi	Menugaskan PNS yang berkompeten untuk mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	Januari - Desember	Sekretaris / PPTK
RSUBK 21	Pelayanan ASN yang tidak optimal disebabkan oleh Sarana/ prasarana gedung kantor yang tidak terpelihara	Mitigasi	Surat kepada rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak perjanjian	Januari - Desember	Sekretaris / PPTK
RSUBK 17	Kekurangan pagu anggaran pembayaran gaji THL disebabkan oleh Adanya penambahan tenaga harian lepas wakar dan tenaga kebersihan	Mitigasi	Memastikan ketersediaan dana untuk pembayaran gaji THL	Januari - Desember	Sekretaris / PPTK
RSUBK 14	Tidak terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin penunjang tugas dan fungsi dinas disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	Mitigasi	Membuat Rencana Kebutuhan Barang dan Mesin	Januari - Desember	Sekretaris / PPTK
RSUBK 18	Terhambatnya aktivitas pengguna kendaraan dinas perorangan dan jabatan disebabkan oleh Pemeliharaan kerusakan yang tidak dapat diprediksi	Mitigasi	Membuat kartu kendali perbaikan / perawatan kendaraan	Januari - Desember	Sekretaris / PPTK
RSUBK 19	Tidak maksimalnya pelayanan di lapangan disebabkan oleh Kendaraan dinas operasional / lapangann yang tidak terpelihara	Mitigasi	Membuat kartu kendali perbaikan / perawatan kendaraan	Januari - Desember	Sekretaris / PPTK
RSUBK 5	Laporan BMD yang tidak valid disebabkan oleh Asset yang tidak tercatat	Mitigasi	Penyusunan rekapitulasi belanja modal yang menjadi asset Dinas Sosial per triwulan	Maret – Juni – September - Desember	Sekretaris / PPTK
RSUBK 20	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan peralatan / mesin disebabkan oleh Peralatan dan mesin yang tidak dipelihara/dirawat	Mitigasi	Membuat kartu kendali perbaikan / perawatan peralatan dan mesin	Januari - Desember	Sekretaris / PPTK
RSUBK 6	Data ASN yang tidak update disebabkan oleh Belum semua data ASN terkumpul menjadi database	Mitigasi	Memaksimalkan penggunaan aplikasi My SAPK	Januari - Desember	Sekretaris / PPTK
RSUBK 13	Kehilangan dokumen arsip yang diperlukan disebabkan oleh Tidak tertatanya arsip pada dinas sosial	Mitigasi	Pendampingan dari Dinas Kearsipan dalam pengelolaan arsip	Januari - Desember	Sekretaris / PPTK
RSUBK 8	Kemampuan OPD yang belum dapat memenuhi kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Mitigasi	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Januari - Maret	Sekretaris / PPTK

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
	Kantor disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana				
RSUBK 12	Perjalanan dinas yang tidak efisien dan efektif disebabkan oleh Perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan	Mitigasi	Membuat kartu kendali perjalanan dinas	Januari - Desember	Sekretaris / PPTK
RSUBK 3	Gaji dan Tunjangan ASN yang tidak terbayarkan disebabkan oleh Adanya Penambahan Pegawai, Perubahan Regulasi dan Hilangnya data Base Pegawai /ASN	Mitigasi	Koordinasi dengan BPKAD dalam rangka rekonsiliasi gaji dan tunjangan ASN	Mei - Juni	Sekretaris / PPTK
RSUBK 4	Laporan Berkala Belum Memberikan Keyakinan Yang Wajar disebabkan oleh Laporan Terlambat Dikumpulkan	Diterima	Rapat evaluasi internal	Januari - Desember	Sekretaris / PPTK
RSUBK 1	Terlambatnya penyelesaian Dokumen Perencanaan disebabkan oleh Bahan dan Data untuk penyusunan dokumen belum tersedia	Mitigasi	1. Melakukan reviu RENJA. 2. Penyusunan KAK. 3. Mengikuti regulasi terkait perencanaan	Pebruari – Maret – Juni – Agustus – September	Sekretaris / PPTK
RSUBK 2	Laporan Sakip, E-Pantau, LPPD belum dapat di nilai dengan baik disebabkan oleh Kurangnya Koordinasi Antar Bidang	Mitigasi	Rapat pengendalian kinerja internal Dinas Sosial	Januari - Desember	Sekretaris / PPTK
RSUBK 10	Tidak terpenuhinya semua Barang Cetakan dan Penggandaan disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	Diterima	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Januari - Desember	Sekretaris / PPTK
RSUBK 9	Kurang terpenuhinya Bahan Logisti Kantor disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan logistik yang dibutuhkan	Diterima	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Maret – Juni – September – Desember	Sekretaris / PPTK
RSUBK 11	Tidak terpenuhinya kebutuhan bahan / material pendukung kegiatan disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan material yang dibutuhkan	Dierima	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Januari - Desember	Sekretaris / PPTK
RSUBK 7	Pencahayaan ruangan kerja dan lingkungan kantor tidak baik disebabkan oleh Tidak tersedia komponen instalasi listrik dan penerangan	Dierima	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Maret – Juli - Nopember	Sekretaris / PPTK
RSUBK 15	Terlambatnya proses administrasi yang membutuhkan meterai, dll disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta ketersediaan anggaran belanja jasa surat menyurat yang tidak sesuai	Dierima	Penggunaan bahan surat dan benda pos secara efisien	Januari - Desember	Sekretaris / PPTK

g. Pemantauan Risiko

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Tidak Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel
Pemantauan RTP Risiko Program dan Kegiatan eselon III

No	Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(5)	(16)
1	Melakukan rapat monitoring evaluasi dan pengendalian													Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK
2	BA kesepakatan hasil MUSRENBANG													Sekretaris / Perencana	Sekretaris / Perencana
3	Surat Edaran Percepatan dan Optimalisasi Pencapaian Target Kinerja dan Realisasi Keuangan APBD Murni dan APBD-P Tahun Anggaran 2025													Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK

Keterangan : (Warna Hijau rencana pelaksanaan)
(Warna Kuning Realisasi pelaksanaan)

h. Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pengendalian Risiko

Tabel
Pelaksanaan Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan eselon III Tahun 2025

No.	Rencana Tindak Pengendalian Risiko	Tanggal Pelaksanaan	Keterjadian Risiko (Ya/Tidak)	Output Kegiatan pengendalian	Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan pengendalian/ Risiko Sisa yang belum dapat dikendalikan	Upaya telah dilakukan dalam penanganan risiko sisa (residual risk).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Menugaskan PNS yang berkompeten untuk mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	5 s/d 11 Maret 2025	Tidak	ASN memiliki sertifikat pengembangan kompetensi perencanaan dan pelaporan kinerja	-	
2	Rekonsiliasi Gaji dengan Bidang Anggaran BPKAD	5 Juni 2025	Tidak	Kertas Kerja Rekonsiliasi Gaji ASN	-	
3	Penyusunan rekapitulasi belanja modal yang menjadi asset Dinas Sosial per triwulan		Tidak		-	

i. Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel

Capaian Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

No.	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator	Target Tahun 2025		Realisasi Target		% Capaian	
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan Rp)	Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74	14.900.500.961	73,57	12.819.357.453	99,42	86,03
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP	74	514.524.615	73,57	213.344.500	99,42	41,46
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	288.726.055	2	124.652.500	100	43,17
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	30.443.000	12	11.741.800	100	38,60
1.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	68.031.500	8	37.001.450	100	54,39
1.1.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	30.586.200	1	8.862.900	100	28,98
1.1.5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	80.588.660	1	17.635.800	100	21,88
1.1.6	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokume Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	16.149.200	1	13.450.050	100	83,28
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Daerah	12	11.455.839.804	12	10.242.668.737	100	89,41
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.732	11.193.095.490	1.732	10.066.648.537	100	89,94
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	102.113.200	1	47.230.650	100	46,25

No.	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator	Target Tahun 2025		Realisasi Target		% Capaian	
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan Rp)	Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	143.585.060	12	119.580.750	100	83,28
1.2.4	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	17.046.054	1	9.208.800	100	54,02
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	7	121.140.500	7	94.214.800	100	77,77
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	12.500.000	2	4.810.000		38,48
1.3.2	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	36.900.000	3	36.900.000	100	100
1.3.3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	4	46.740.500	4	28.364.800	100	60,69
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	2	19.364.800	2	12.078.800	100	62,38
1.4.1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	19.364.800	2	12.078.800	100	62,38
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8	744.861.401	8	662.477.673	100	88,94
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	5.110.200	1	5.000.000	100	97,84
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	64.774.506	1	63.229.400	100	97,61
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	155.886.225	3	134.775.000	100	86,46
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	339.194.710	2	332.874.850	100	98,14
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	61.802.500	3	26.416.900,	100	42,74

No.	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator	Target Tahun 2025		Realisasi Target		% Capaian	
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan Rp)	Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	94.551.660	15	87.531.523	100	92,57
1.5.7	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	13.541.600	4	4.070.000	100	30,05
1.6.8	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	10.000.000	2	8.580.000	100	85,80
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	101.439.134	100	101.056.997	100	99,62
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	101.439.134	10	101.056.997	100	99,62
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	1.312.888.327	12	1.059.290.017	100	80,68
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.299.000	1	2.292.000	100	99,70
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	316.485.288	12	272.825.272	100	86,20
1.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	994.104.039	12	784.172.745	100	78,88
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial	100	630.442.400	100	434.225.929	100	68,92
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33	150.000.000	33	87.739.220	100	58,49
1.8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	150.000.000	5	84.003.008	100	56,00
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	75.000.000	12	42.195.000	100	56,26
1.8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Dipelihara	2	227.412.400	2	216.658.701	100	95,27

No.	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator	Target Tahun 2025		Realisasi Target		% Capaian	
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan Rp)	Fisik	Keu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.8.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dipelihara	6	28.030.000	4	3.630.000	66,66	12,95

3.2.2 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Nama Pejabat : Ahmad Fahruji, ST., MM
NIP : 19781208 200902 1 001

j. Program dan kegiatan yang dikelola sesuai Tabel berikut:

Tabel
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Anggaran

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	1.099.896.400
2	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	175.209 Jiwa	147.997.400
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Capukan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	65.403 KK	142.499.25
4	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.500 KK	3.657.256.200
5	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Jiwa	38.182.400

k. Hasil Identifikasi Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel
Hasil identifikasi Risiko Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	RSUBK 50	Jumlah DTKS yang belum diverifikasi dan divalidasi	-Kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan pendataan DTKS - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Eksternal dan Internal	UC	Adanya penerima bantuan yang tidak tepat sasaran	Kabid LINJAMSOS / PPTK
2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Capukan Daerah Kabupaten/Kota	RSUBK 51	Jumlah DTKS yang belum diverifikasi dan divalidasi	-Kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan pendataan DTKS - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Eksternal dan Internal	UC	Adanya penerima bantuan yang tidak tepat sasaran	Kabid LINJAMSOS / PPTK
3.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	RSUBK 52	Tidak tersalurkannya bantuan sosial	Data penerima manfaat yang belum terverifikasi dan tervalidasi secara maksimal	Eksternal dan Internal	UC	Meningkatnya angka kemiskinan	Kabid LINJAMSOS / PPTK
4.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	RSUBK 53	Tidak tersalurkannya bantuan pengembangan ekonomi	Pelaksanaan proses verifikasi penerima manfaat WRSE yang kurang maksimal	Eksternal dan Internal	UC	Meningkatnya angka kemiskinan	Kabid LINJAMSOS / PPTK

l. Hasil Analisis Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut

Tabel
Hasil Analisis Risiko Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
RSUBK 50	Belum semua DTKS diverifikasi dan divalidasi disebabkan oleh Kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan pendataan DTKS	2	4	20	Sangat Tinggi	Sinkronisasi DTKS dengan data kependudukan	Memadai	Efektif	Ada

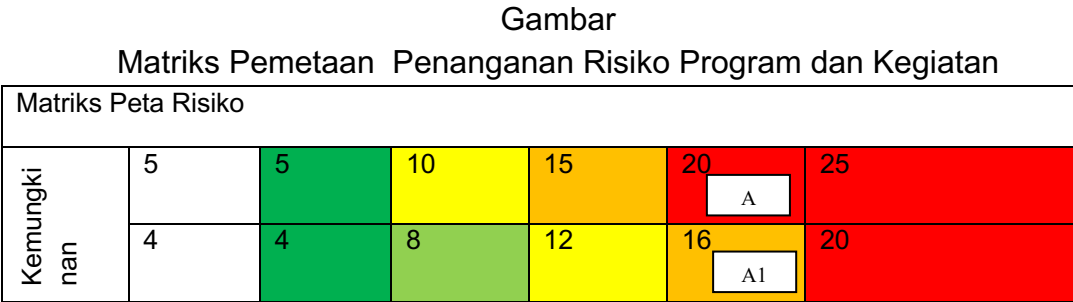
Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/Tidak Efektif	
RSUBK 51	Belum semua DTKS diverifikasi dan divalidasi disebabkan oleh Kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan Pengelolaan pendataan DTKS	2	4	20	Sangat Tinggi	Sinkronisasi DTKS dengan Data kependudukan	Memadai	Efektif	Ada
RSUBK 52	Tidak tersalurkannya bantuan sosial disebabkan oleh Data penerima manfaat yang belum terverifikasi dan tervalidasi secara maksimal	5	4	20	Tinggi	Melakukan verivali dan pembuatan SK Penerima Manfaat	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 53	Tidak tersalurkannya bantuan pengembangan ekonomi disebabkan oleh, pelaksanaan proses verivali penerima manfaat WRSE kurang maksimal	5	4	20	Tinggi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Memadai	Efektif	Tidak Ada

m. Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan Eselon III sebagai berikut:

Tabel
 Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat	Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/ Dihindari/Dibagi)	Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko Setelah Pengendalian			
							K	D	Skor	Level risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RSUBK 50	DTKS yang belum tervirifikasi dan di validasi disebabkan oleh Kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan pendataan DTKS	20	Sangat Tinggi	3	Mitigasi	Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pendataan fakir miskin	4	4	16	Sangat Tinggi
RSUBK 51	Pengelolaan data fakir miskin tidak maksimal disebabkan oleh kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan pengelolaan pendataan DTKS	20	Sangat Tinggi	2	Mitigasi	Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pendataan fakir miskin	4	4	16	Sangat Tinggi
RSUBK 52	Tidak tersalurkannya bantuan sosial disebabkan oleh Data penerima manfaat yang belum terverifikasi dan tervalidasi secara maksimal	20	Tinggi	1	Mitigasi	Melakukan proses verval secara maksimal	4	4	16	Tinggi
RSUBK 53	Tidak tersalurkannya bantuan pengembangan ekonomi disebabkan oleh proses verivali penerima manfaat WRSE kurang maksimal	15	Tinggi	4	Mitigasi	Melakukan proses verval secara maksimal	4	4	16	Tinggi

n. Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan :



↓

	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

Ket. A = RPROG5 (sebelum penanganan Risiko)
 A1 = RPROGR5 (setelah penanganan Risiko)

o. Respon dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko

Respon dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Program dan Kegiatan eselon III sesuai dengan Tabel berikut:

Tabel
 Rencana Tindak Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan/sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RSUBK 50	DTKS yang belum tervirifikasi dan di validasi disebabkan oleh Kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan pendataan DTKS	Pendampingan TKSK, SDM PKH, Puskesmas Desa/Kelurahan	Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pendataan fakir miskin	Verifikasi Kelayakan dilakukan sejak tanggal 15 s/d 25 (5 Hari sebelum hari terakhir setiap bulan pada Aplikasi SIKS NG (Bulan Januari s/d Desember)	Puskesmas Desa/ Kelurahan, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
RSUBK 51	Pengelolaan data fakir miskin tidak maksimal disebabkan oleh Kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan pendataan DTKS	Pendampingan TKSK, SDM PKH, Puskesmas Desa/Kelurahan	Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pendataan fakir miskin	Verifikasi Kelayakan dilakukan sejak tanggal 15 s/d 25 (5 Hari sebelum hari terakhir setiap bulan pada Aplikasi SIKS NG (Bulan Januari s/d Desember)	Puskesmas Desa/ Kelurahan, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
RSUBK 52	Tidak terlasurkannya bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Mitigasi	Melakukan verivali dan pembuatan SK Penerima Manfaat	Januari s/d Desember	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial/PPTK

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RSUBK 53	Tidak terlasurkannya bantuan pengembangan ekonomi	Mitigasi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Januari s/d Desember	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial/PPTK

- p. Pemantauan Risiko
- Pemantauan Pelaksanaan Rencana Tidak Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel

Pemantauan RTP Risiko Program dan Kegiatan eselon III

No	Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(5)	(16)
1	Melakukan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial / PPTK	Kabid LINJAMSO S / PPTK
2	Melaksanakan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial / PPTK	Kabid LINJAMSO S / PPTK
3	Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga													Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial / PPTK	Kabid LINJAMSO S / PPTK
4	Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat													Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial / PPTK	Kabid LINJAMSO S / PPTK

Keterangan : (Warna Hijau rencana pelaksanaan)
(Warna Kuning Realisasi pelaksanaan)

q. Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pengendalian Risiko
Tabel

Pelaksanaan Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan eselon III Tahun 2025

No.	Rencana Tindak Pengendalian Risiko	Tanggal Pelaksanaan	Keterjadian Risiko (Ya/Tidak)	Output Kegiatan pengendalian	Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan pengendalian/ Risiko Sisa yang belum dapat dikendalikan	Upaya telah dilakukan dalam penanganan risiko sisa (residual risk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pendataan fakir miskin	Januari s/d Desember	Ya	Akurasi data terpadu kesejahteraan sosial	Adanya data terpadu yang belum sinkron dengan data dukcapil	Melakukan pemadanan data terpadu dengan data dukcapil
2	Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pendataan fakir miskin	Januari s/d Desember	Ya	Akurasi data terpadu kesejahteraan sosial	Adanya data terpadu yang belum sinkron dengan data dukcapil	Melakukan pemadanan data terpadu dengan data dukcapil
3	PMKS yang tidak memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial disebabkan oleh Data PMKS yang belum terverifikasi dan valid ; terbatasnya sumber daya yang dimiliki	Januari s/d Desember	Ya	Hasil konsolidasi dan sinkronisasi data penerima bantuan	Data PMKS yang belum terverifikasi dan Valid karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki	Melakukan verivali data di lapangan dengan sumber daya yang memadai
4	Tidak tersalurkannya bantuan pengembangan ekonomi disebabkan oleh proses verivali penerima manfaat WRSE terlambat	Januari s/d Desember	Ya	Hasil konsolidasi dan sinkronisasi data penerima bantuan	Data penerima manfaat WRSE belum terverifikasi dan Valid	Melakukan verivali data di lapangan Bersama Pendamping Sosial Kecamatan dan Kelurahan/Desa

r. Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel
Capaian Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

No.	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator	Target Tahun 2025		Realisasi Target		% Capaian	
			Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan Rp)	Fisik	Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Terdata masuk Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	175.209 orang	147.997.400	165097	131.516.451	94,23	88,87
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Capukan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Yang Sudah Terverifikasi Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	65.403 keluarga	142.499.250	65158	95.624.180	99,63	67,10
	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 keluarga	3.657.256.200	957	3.414.275.045	90,70	93,35
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Penerima Bantuan Pengembangan Ekonomi	30 orang	38.182.400	0	37.379.200	0	97,89

3.2.3 Bidang Penangan Korban Bencana

Nama Pejabat : Riadi Hadiwonoto, S.Hut
NIP : 196812212003121002

s. Program dan kegiatan yang dikelola sesuai Tabel berikut:

Tabel
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Anggaran

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target	Jumlah Anggaran
I.	Program Penanganan Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam & Sosial Kab/Kota		Presentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 %	1.575.822.090
	1.	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kab/Kota	1500 Orang	725.822.090
	2.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang mendapatkan pakaian & kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kab/kota	1500 Orang	400.000.000
	3.	Penyediaan Tempat Penampungan pengungsi	Jumlah Tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	10 Unit	75.000.000
	4.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan	50 Orang	75.000.00

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target	Jumlah Anggaran
			Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Program Penanganan Penanganan Bencana Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota		Presentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 %	300.000.000
	1.	Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi & pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kab/Kota	0 Kampung	0
	2.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kab/Kota	23 Orang	300.000.000
II.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	2 Dokumen	1.774.204.000
		1. Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman	2 Dokumen	1.474.204.000

No.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator	Target	Jumlah Anggaran
			Nasional Kab/Kota	Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota		
		2.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kab/Kota	91 Makam	300.000.000
			Jumlah			Rp.3.350.026.090,00

t. Hasil Identifikasi Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel
Hasil identifikasi Risiko Program dan Kegiatan

No.	Prog/Keg/Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Program Penanganan Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam & Sosial Kab/Kota		<ul style="list-style-type: none"> •potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Kerugian tersebut dapat berupa: Kematian • Luka, Sakit Jiwa terancam,Hilangn ya rasa aman (Mengungsi) Kerusakan atau kehilangan harta, terganggu kegiatan masyarakat 	Faktor alam, Faktor Non Alam, dan Faktor sosial/ manusia murni penyebabnya dari kelalaian manusia	Internal dan Eksternal	UC	Kehilangan Rumah Tempat Tinggal, kehilangan harta benda, kehilangan dokumen penting, kehilang nyawa, dsbnya disebabkan bencana alam, non alam, dan sosial	Kabid Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
1.	Sub. Kegiatan Penyediaan Makanan	RSUBK 57	Bantuan permakanan selama tanggap darurat belum disampaikan ke korban bencana	Belum diterima data korban bencana dari Pihak Desa/Kelurahan serta Surat pendukung (Permohonan Bantuan ke Dinsos dari Desa/Kelurahan) Barang bantuan	Internal dan Eksternal	UC	Tidak terpenuhinya kebutuhan permakanan korban bencana alam dan sosial	Kabid Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

No.	Prog/Keg/Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				bisa dikeluarkan dari Gudang Bencana, Keterlambatan proses pengadaan permakanaan				
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	RSUBK 58	Bantuan Sandang selama tanggap darurat belum disampaikan ke korban bencana	Belum dapat data korban bencana dari Pihak Desa/Kelurahan serta Surat pendukung (Permohonan Bantuan ke Dinsos dari Desa/Kelurahan) Barang bantuan bisa dikeluarkan dari Gudang Bencana, Keterlambatan proses pengadaan permakanaan	Internal dan Eksternal	UC	Tidak terpenuhinya kebutuhan permakanaan korban bencana alam dan sosial	Kabid Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	RSUBK 59	Fasilitas Tenda untuk tempat penampungan pengungsi tidak memadai dan memerlukan tambahan fasilitas terbaru dan kuat	Ruang Penyimpanan yang kurang memadai, rusak karena usia fasilitas, kurangnya fasilitas tersebut yang sangat diperlukan dalam penanganan bencana	Eksternal dan Internal	UC	Jika dibutuhkan akan kurang karena fasilitasnya sudah tidak memadai dan KSB di desa/Kel tidak dapat menerima bantuan karena fasilitas tempat penampungan tidak cukup dan tidak dalam kondisi prima	Kabid Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
4.	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	RSUBK 60	Belum optimalnya kinerja Taruna Siaga Bencana dalam penanganan bencana di wilayahnya masing-masing dan dalam memberi layanan psikososial dikarenakan jarang menemui korban trauma pasca bencana	Kurangnya jumlah SDM TAGANA, Posisi TAGANA bertumpuk di Tenggarong, TAGANA di Kecamatan Minim, TAGANA belum pernah memberikan pelayanan psikososial	Eksternal dan Internal	UC	Menurunya pelayanan Taruna Siaga Bencana dalam membantu penanganan pasca bencana	Kabid Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

No.	Prog/Keg/Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Penanganan Penanganan Bencana Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota		potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Kerugian tersebut dapat berupa: Kematian Luka, Sakit Jiwa terancam, Hilangnya rasa aman (Mengungsi) Kerusakan atau kehilangan harta, terganggu kegiatan masyarakat	Faktor alam, Faktor Non Alam, dan Faktor sosial/ manusia murni penyebabnya dari kelalaian manusia	Internal dan Eksternal	UC	Kehilangan Rumah Tempat Tinggal, kehilangan harta benda, kehilangan dokumen penting, kehilangan nyawa, dsbnya disebabkan bencana alam, non alam, dan sosial	Kabid Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
1.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	RSUBK 61	Kurang optimalnya pelaksanaan Kampung Siaga Bencana, Pembentukan Kampung Siaga Bencana tidak sesuai kriteria yang ditetapkan peraturan Permensos RI Nomor 128 Tahun 2011	Masing rendahnya SMD dalam pengelolaan kampung siaga bencana, Kurangnya dana perjalanan dinas kegiatan untuk koordinasi	Eksternal dan Internal	UC	Tidak berkembangnya Kampung Siaga Bencana	Kabid Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
2.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	RSUBK 62	Belum optimalnya kinerja Taruna Siaga Bencana dalam penanganan bencana di wilayahnya masing-masing	Kurangnya jumlah SDM TAGANA, Posisi TAGANA bertumpuk di Tenggarong, TAGANA di Kecamatan Minim	Internal	C	Menurunnya pelayanan Taruna Siaga Bencana dalam membantu penanganan bencana	Kabid Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
II.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan belum maksimal	Tidak terpeliharanya Taman Makam Pahlawan, Minimnya informasi mengenai Taman Makam Pahlawan dari segi identitas yang dimakamkan	Internal	C	Kerusakan asset Taman Makam Pahlawan, Kurangnya minat kunjungan karena kurang terpelihara	Kabid Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
1	Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	RSUBK 63	Rusaknya Taman Makam Pahlawan	Tidak terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Internal	C	Kerusakan asset Taman Makam Pahlawan	Kabid Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

No.	Prog/Keg/Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	RSUBK 64	Rusaknya Taman Makan Pahlawan	Tidak terpeliharanya Taman Makan Pahlawan	Internal	C	Kerusakan asset Taman Makam Pahlawan	Kabid Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

u. Hasil Analisis Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut

Tabel
Hasil Analisis Risiko Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan

Kode Risiko.	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko				Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Perlakuan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian Tambahan	Analisis Risiko Setelah Pengendalian				Resiko Sisa/Residual Risk
		K	D	Skor	Kategori/ Level risiko		Memadai/ Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif			K	D	Skor	Kategori/ Level risiko	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11	12	13	14		
RSUBK 57	Korban Bencana belum menerima bantuan pada saat tanggap darurat untuk permakanan	5	4	20	Tinggi		Memadai	Efektif	Mitigasi	Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan, Meminta bantuan dari Provinsi untuk memenuhi pasokan logistik di gudang bencana	2	4	8	Rendah	Ada
RSUBK 58	Korban Bencana belum menerima bantuan pada saat tanggap darurat untuk bantuan sandang	5	4	20	Tinggi		Memadai	Efektif	Mitigasi	Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan, Meminta bantuan dari Provinsi untuk memenuhi pasokan logistik di gudang bencana	2	4	8	Rendah	Ada
RSUBK 59	Belum optimalnya kinerja Taruna Siaga Bencana dalam memberikan	3	4	12	Sedang		Memadai	Efektif	Mitigasi	Koordinasi dengan Pihak OPD Teknis lainnya dan Pihak Desa/Kelurahan yang terkena bencana	2	2	4	Sangat Rendah	Ada

Kode Risiko.	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko				Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Perlakuan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian Tambahan	Analisis Risiko Setelah Pengendalian				Resiko Sisa/Residual Risk
		K	D	Skor	Kategori/ Level risiko		Memadai/ Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif			K	D	Skor	Kategori/ Level risiko	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11	12	13	14		
	layanan psikososial di wilayahnya masing-masing atau dalam penanganan bencana														
RSUBK 60	Kurangnya fasilitas tempat penampungan pengungsi yang dibutuhkan dalam penanganan bencana	3	4	12	Sedang		Memadai	Efektif	Mitigasi	Koordinasi dengan Pihak OPD Teknis lainnya dan Pihak Desa/Kelurahan yang terkena bencana	2	2	4	Sangat Rendah	Ada
RSUBK 61	Kurang optimalnya pelaksanaan Kampung Siaga Bencana disebabkan oleh Masing rendahnya SMD dalam pengelolaan kampung siaga bencana	3	4	12	Sedang		Memadai	Efektif	Mitigasi	Inventarisasi permasalahan Kampung Siaga Bencana	2	3	6	Rendah	Ada
RSUBK 62	Belum optimalnya kinerja Taruna Siaga Bencana dalam penanganan	3	4	12	Sedang		Memadai	Efektif	Mitigasi	Laporan TAGANA	2	2	4	Sangat Rendah	Ada

Kode Risiko.	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko				Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Perlakuan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian Tambahan	Analisis Risiko Setelah Pengendalian				Resiko Sisa/Residual Risk
		K	D	Skor	Kategori/ Level risiko		Memadai/ Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif			K	D	Skor	Kategori/ Level risiko	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11	12	13	14		
	bencana di wilayahnya masing-masing														
RSUBK 63	Rusaknya Taman Makan Pahlawan disebabkan oleh Tidak terpeliharanya Taman Makan Pahlawan	3	4	12	Sedang		Memadai	Efektif	Mitigasi	Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal	2	2	4	Sangat Rendah	Ada
RSUBK 64	Rusaknya Taman Makan Pahlawan disebabkan oleh Tidak terpeliharanya Taman Makan Pahlawan	3	4	12	Sedang		Memadai	Efektif	Mitigasi	Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal	2	2	4	Sangat Rendah	Ada

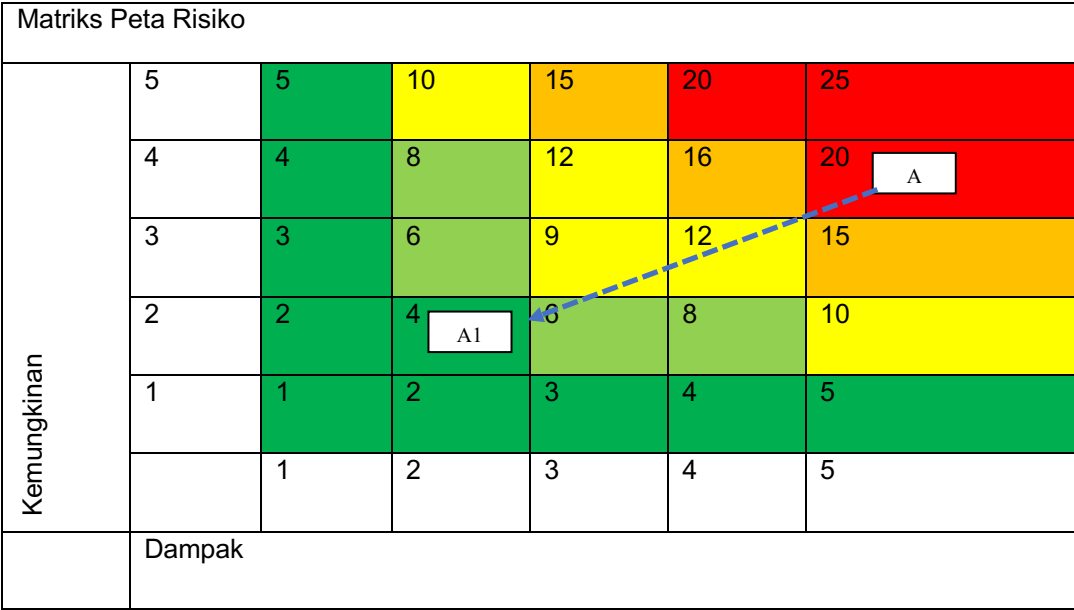
v. Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan Eselon III sebagai berikut:

Tabel
Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat	Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/ Dihindari/Dibagi)	Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko Setelah Pengendalian			
							K	D	Skor	Level risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RSUBK 44	DTKS yang belum tervirifikasi dan di validasi disebabkan oleh Kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan pendataan DTKS	20	Sangat Tinggi	1	Mitigasi	Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pendataan fakir miskin	5	4	20	Sangat Tinggi
RSUBK 43	DTKS yang belum tervirifikasi dan di validasi disebabkan oleh Kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan pendataan DTKS	20	Sangat Tinggi	2	Mitigasi	Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pendataan fakir miskin	5	4	20	Sangat Tinggi

w. Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan

Gambar
Matriks Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan



Ket. A = RPROG5 (sebelum penanganan Risiko)
 A1 = RPROGR5 (setelah penanganan Risiko)

x. Hasil Evaluasi Risiko Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Eselon III sebagai berikut:

Tabel
Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RSUBK 57	Penyediaan makanan tidak tepat waktu disebabkan oleh Keterlambatan proses pengadaan permakanan	20	Tinggi	2
RSUBK 58	Penyediaan sandang tidak tepat waktu disebabkan oleh Keterlambatan proses pengadaan permakanan	20	Tinggi	2
RSUBK 59	Kurangnya fasilitas tempat penampungan pengungsi yang dibutuhkan dalam penanganan bencana	12	Sedang	3
RSUB 60	Belum optimalnya kinerja Taruna Siaga Bencana dalam memberikan layanan psikososial di wilayahnya masing-masing atau dalam penanganan bencana	12	Sedang	3
RSUBK 61	Kurang optimalnya pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	12	Sedang	3

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	disebabkan oleh Masing rendahnya SMD dalam pengelolaan kampung siaga bencana			
RSUBK 62	Belum optimalnya kinerja Taruna Siaga Bencana dalam penanganan bencana di wilayahnya masing-masing	12	Sedang	3
RSUBK 63	Rusaknya Taman Makan Pahlawan disebabkan oleh Tidak terpeliharanya Taman Makan Pahlawan	12	Sedang	3
RSUBK 64	Rusaknya Taman Makan Pahlawan disebabkan oleh Tidak terpeliharanya Taman Makan Pahlawan	12	Sedang	3

y. Perlakukan (*Respon*) dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko

Respon dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Program dan Kegiatan eselon III Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel
Rencana Tindak Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan/sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RSUBK 57	Kurangnya persediaan logistik makanan di Gudang Bencana untuk disampaikan ke korban musibah, bencana dalam Upaya penanganan Bencana (Masa Tanggap Darurat)	Membuat laporan stock opname barang bantuan secara berkala, perhitungan setiap ada barang masuk dan barang keluar untuk mengetahui posisi barang setiap akhir bulan dan dilaporkan ke Dinas Sosial Prov.Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan Pengadaan Permakanan Permintaan Barang logistik ke Dinas Sosial Provinsi Kaltim 	Pada Stock opname mulai menipis dan laporan dibuat petugas logistik diketahui Kepala Bidang dan dilaporkan ke Atasan Langsung	Kepala Bidang Penangan an Korban Bencana dan Pengelola an Taman Makam Pahlawan

Kode Risiko	Risiko	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RSUBK 58	Kurangnya persediaan logistik Sandang di Gudang Bencana untuk disampaikan ke korban musibah, bencana dalam Upaya penanganan Bencana (Masa Tanggap Darurat)	Membuat laporan stock opname barang bantuan secara berkala, perhitungan setiap ada barang masuk dan barang keluar untuk mengetahui posisi barang setiap akhir bulan dan dilaporkan ke Dinas Sosial Prov.Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan Pengadaan untuk Penyediaan Sandang Permintaan Barang logistik ke Dinas Sosial Provinsi Kaltim 	Pada Stock opname mulai menipis dan laporan dibuat petugas logistik diketahui Kepala Bidang dan dilaporkan ke Atasan Langsung	Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
RSUBK 59	Kurangnya fasilitas tempat penampungan pengungsi yang dibutuhkan dalam penanganan bencana	Tidak maksimal dalam penanganan bencana dengan tujuan mengurangi risiko bencana	Merawat fasilitas tenda pengungsi siaga bencana yang masih ada	Mengadakan pengadaan tenda siaga bencana untuk nantinya bisa diserahkan ke kampung siaga bencana	Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
RSUBK 60	Belum optimalnya kinerja Taruna Siaga Bencana dalam penanganan bencana di wilayahnya masing-masing dan dalam menangani psikososial korban bencana	Membuat Laporan TAGANA tentang penanganan korban bencana dan layanan dukungan psikososial kepada korban pasca bencana	Pembekalan Layanan Dukungan Psikososial kepada TAGANA	Dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan	Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
RSUBK 61	Tidak Terlaksananya Sosialisasi	Menelusuri Surat Keputusan Kampung Siaga Bencana,	<ul style="list-style-type: none"> Membuat surat pemberitahuan tentang jadwal sosialisasi 	Dilaksanakan sesuai dengan	Kepala Bidang Penanganan Korban

Kode Risiko	Risiko	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kampung Siaga Bencana	Koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kaltim tentang pelaksanaan KSB serta menjalin Kerjasama untuk dibantu sebagai narasumber di sosialisasi KSB, serta koordinasi ke Desa/Kel dan Kecamatan ttg kesediaan waktudan tempat pelaksanaan, konsumsi, kesediaan menghadirkan peserta yang berkesesuaian dengan kegiatan	<p>kepada pejabat pemerintahan desa/Kelurahan serta tembusan surat ke Camat di wilayah desa /kelurahan tempat pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat Surat Pemberitahuan tentang jadwal pelaksanaan sosialisasi ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 	jadwal sosialisasi	Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
RSUBK 62	Tidak Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Merencanakan jadwal kegiatan yang melibatkan TAGANA	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Telaahan Staf ke Sekretaris Daerah perihal pelaksanaan kegiatan Kampung Siaga Bencana Dimana kegiatan ini melibatkan anggota TAGANA • Menyusun Jadwal dan tempat pelaksanaan • Membuat Surat Pemberitahuan tentang jadwal pelaksanaan kegiatan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 	Dilaksanak an sesuai dengan jadwal kegiatan	Kepala Bidang Penangan an Korban Bencana dan Pengelola an Taman Makam Pahlawan
RSUBK 63	Tidak Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan di Kab.Kutai Kartanegara	Melanjutkan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan yang sebelumnya dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Memonitoring pelaksanaan kegiatan rehab serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 	Dilaksanak an sesuai tenggat waktu di kontrak	Kepala Bidang Penangan an Korban Bencana dan

Kode Risiko	Risiko	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	<p>Dimana CV penyedia sudah ditentukan sebelum bidang ini terbentuk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Jadwal dan tempat pelaksanaan • Membuat Surat Pemberitahuan tentang jadwal pelaksanaan kegiatan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
RSUBK 64	Tidak Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan di Kab.Kutai Kartanegara	Melanjutkan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan yang sebelumnya dilaksanakan Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Memonitoring pelaksanaan kegiatan rehab serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Dimana CV penyedia sudah ditentukan sebelum bidang ini terbentuk. • Menyusun Jadwal dan tempat pelaksanaan • Membuat Surat Pemberitahuan tentang jadwal pelaksanaan kegiatan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 	Dilaksanakan sesuai tenggat waktu di kontrak	Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

z. Pemantauan Risiko

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Tidak Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel
Pemantauan RTP Risiko Program dan Kegiatan eselon III

No	Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengedalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/ Penanggung jawab Risiko
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(5)	(16)
1	<ul style="list-style-type: none">Mengadakan Pengadaan PermakananPermintaan Barang logistik ke Dinas Sosial Provinsi Kaltim	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Penangan an Bencana dan Pengelola an Taman Makam Pahlawan	Bidang Penan ganan Benca na dan Pengel olaan Taman Makam Pahlaw an
					√							√	√		
2	<ul style="list-style-type: none">Mengadakan Pengadaan untuk Penyediaan SandangPermintaan Barang logistik ke Dinas Sosial Provinsi Kaltim	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Penangan an Bencana dan Pengelola an Taman Makam Pahlawan	Bidang Penan ganan Benca na dan Pengel olaan Taman Makam Pahlaw an
					√							√	√		
3	<ul style="list-style-type: none">Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwalMelaksanakan pengadaan tenda	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Penangan an Bencana dan Pengelola an Taman Makam Pahlawan	Bidang Penan ganan Benca na dan Pengel olaan Taman Makam Pahlaw an
												√	√		
4	Pembekalan Layanan Dukungan Psikososial Kepada TAGANA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Penangan an Bencana dan Pengelola an Taman Makam Pahlawan	Bidang Penan ganan Benca na dan Pengel olaan Taman Makam Pahlaw an
		√				√	√			√	√		√		
5.	Membuat surat pemberitahuan tentang jadwal sosialisasi kepada pejabat pemerintahan desa/Kelurahan serta tembusan surat ke Camat di wilayah desa /kelurahan tempat pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Penangan an Bencana dan Pengelola an Taman Makam Pahlawan	Bidang Penan ganan Benca na dan Pengel olaan Taman Makam Pahlaw an

No	Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengedalian (Pihak yg melaksankan RTP)	Pemilik Risiko/ Penanggung jawab Risiko
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(5)	(16)
	<ul style="list-style-type: none"> Membuat Surat Pemberitahuan tentang jadwal pelaksanaan sosialisasi ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 														
6.	<ul style="list-style-type: none"> Membuat Telaahan Staf ke Sekretaris Daerah perihal pelaksanaan kegiatan Kampung Siaga Bencana Dimana kegiatan ini melibatkan anggota TAGANA Menyusun Jadwal dan tempat pelaksanaan Membuat Surat Pemberitahuan tentang jadwal pelaksanaan kegiatan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Bidang Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
7	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal Melaksanakan Rehabilitasi TMP 	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Bidang Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
8	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal Melaksanakan pemeliharaan TMP mulai dari penerangan, tanaman disekitar area makam, dan biaya jasa tenaga pemeliharaan TMP 	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Bidang Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Keterangan : (Warna Hijau rencana pelaksanaan)
(Warna Kuning Realisasi pelaksanaan)

3.2.4 Bidang Pemberdayaan Sosial

Nama Pejabat : Lucy Yulidasari, M.Psi
NIP : 19750717 200801 2 028

aa. Program dan kegiatan yang dikelola sesuai Tabel berikut:

Tabel
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam daerah Kabupaten / Kota			
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang Atau Barang	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin Undian Gratis Ber hadiah dan Pengumpulan Uang Atau Barang	1 Dok	42.516.900,-
2	Kegiatan Pengembangan Potensi sumber kesejahteraan sosial daerah			
2.1	Sub kegiatan Peningkatan kemampuan potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah orang yang mendapat peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat	20 orang	290.087.600,-
2.2	Sub Kegiatan peningkatan kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang meningkat kapasitasnya	20 orang	217.567.700,-
2.3	Peningkatan Kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial Kelembagaan masyarakat	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya	237 lembaga	5.146.837.100,-
2.4	Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat dari hasil Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	5 Sertifikat	30.090.080

bb. Hasil Identifikasi Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel
Hasil identifikasi Risiko Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC / C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik Risiko / Penanggungjawab / Pihak yang terkena dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam daerah Kabupaten / Kota					Hasil sumbangan digunakan untuk kepentingan pribadi dan pelaksanaan undian tanpa izin.	kurangnya pengawasan dari instansi terkait terhadap aktivitas PUB maupun UGB	Internal dan Eksternal	UC/C	Hilangnya pendapatan negara melalui pajak undian dan sumbangan sosial yang seharusnya untuk pembangunan kesejahteraan sosial	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang Atau Barang	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang Atau Barang	1 dok	42.516.900,-	RSUBK 29	Hasil sumbangan digunakan untuk kepentingan pribadi dan pelaksanaan undian tanpa izin.	kurangnya pengawasan dari instansi terkait terhadap aktivitas PUB maupun UGB	Internal dan Eksternal	UC/C	Hilangnya pendapatan negara melalui pajak undian dan sumbangan sosial yang seharusnya untuk pembangunan kesejahteraan sosial	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

cc. Hasil Analisis Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut

Tabel
Hasil Analisis Risiko Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yang sudah ada (Kepatuhan/ Aturan/ SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada / Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai /Tidak memadai	Efektif/ Tidak efektif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
RSUBK 29	Hasil sumbangan digunakan untuk kepentingan pribadi dan serta pelaksanaan undian tanpa izin.	3	3	9	Sedang	Melaksanakan pengawasan bersama antara dinas sosial dan DPMPSTSP sebagai langkah awal penertiban kegiatan PUB dan UGB.	Memadai	Efektif	Tidak
RSUBK 30	Pelaksanaan Penyediaan Bahan peralatan,makan minum peserta serta tempat kegiatan sosialisasi / seminar tidak sesuai kontrak	3	4	12	Tinggi	1. melakukan pesanan sesuai dengan perkiraan peserta yang hadir 2. melaukan verifikasi dan validasi kesesuaian harga 3. mencantumkan jumlah peserta yang hadir didalam undangan 4. membuat ekspedisi tanda terima / sreen shot	Memadai	Efektif	Tidak

RSUBK 31	Pelaksanaan Penyediaan Bahan peralatan,makan minum peserta serta tempat kegiatan sosialisasi / seminar tidak sesuai kontrak	3	4	12	Tinggi	1. melakukan pesanan sesuai dengan perkiraan peserta yang hadir 2. melaukan verifikasi dan validasi kesesuaian harga 3. mencantumkan jumlah peserta yang hadir didalam undangan 4. membuat ekspedisi tanda terima / sreen shot	Memadai	Efektif	Tidak
RSUBK 32	Pelaksanaan Penyediaan Bahan peralatan,makan minum peserta serta tempat kegiatan sosialisasi / seminar tidak sesuai kontrak	3	4	12	Tinggi	1. melakukan pesanan sesuai dengan perkiraan peserta yang hadir 2. melaukan verifikasi dan validasi kesesuaian harga 3. mencantumkan jumlah peserta yang hadir didalam undangan 4. membuat ekspedisi tanda terima / sreen shot	Memadai	Efektif	Tidak
RSUBK 33	Pelaksanaan Penyediaan Bahan peralatan,makan minum peserta serta tempat kegiatan sosialisasi / seminar tidak sesuai kontrak	3	4	12	Tinggi	1. melakukan pesanan sesuai dengan perkiraan peserta yang hadir 2. melaukan verifikasi dan validasi kesesuaian harga 3. mencantumkan jumlah peserta yang hadir didalam undangan 4. membuat ekspedisi tanda terima / sreen shot	Memadai	Efektif	Tidak

dd. Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan Eselon III sebagai berikut:

Tabel
Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat	Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/ DIhindari/ Dibagi)	Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko Setelah Pengendalian			
							K	D	Skor	Level risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RSUBK 29	Hasil sumbangan digunakan untuk kepentingan pribadi dan serta pelaksanaan undian tanpa izin.	9	sedang	1	Mitigasi	Melaksanakan pengawasan bersama antara dinas sosial dan DPMPTSP sebagai langkah awal penertiban kegiatan PUB dan UGB.	1	1	1	Sangat Rendah
RSUBK 30	Pelaksanaan Penyediaan Bahan peralatan,makan minum peserta serta tempat kegiatan sosialisasi / seminar tidak sesuai kontrak	12	Tinggi	4	Mitigasi	Verifikator Penyedia Bahan peralatan , makan minum peserta, Logistik Memeriksa Kelengkapan Dokumen, Kesesuaian Pembayaran belanja makan minum dan Bukti Dukung/Dokum entasi Pelaksanaan kegiatan	2	2	4	Rendah
RSUBK 31	Pelaksanaan Penyediaan Bahan peralatan,makan minum peserta serta tempat kegiatan sosialisasi / seminar tidak sesuai kontrak	12	Tinggi	3	Mitigasi	Verifikator Penyedia Bahan peralatan , makan minum peserta, Logistik Memeriksa Kelengkapan Dokumen, Kesesuaian Pembayaran belanja makan minum dan Bukti Dukung/Dokum entasi Pelaksanaan kegiatan	2	2	4	Rendah

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat	Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/ DIhindari/ Dibagi)	Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko Setelah Pengendalian			
							K	D	Skor	Level risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RSUBK 32	Pelaksanaan Penyediaan Bahan peralatan,makan minum peserta serta tempat kegiatan sosialisasi / seminar tidak sesuai kontrak	12	Tinggi	4	Mitigasi	Verifikator Penyedia Bahan peralatan , makan minum peserta, Logistik Memeriksa Kelengkapan Dokumen, Kesesuaian Pembayaran belanja makan minum dan Bukti Dukung/Dokum entasi Pelaksanaan kegiatan	2	2	4	Rendah

ee.Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan

Gambar
Matriks Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan

Matriks Peta Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

Ket. A = RPROG2 (sebelum penanganan Risiko)
 A1 = RPROGR2 (setelah penanganan Risiko)

ff. Respon dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko

Respon dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Program dan Kegiatan eselon III sesuai dengan Tabel berikut:

Tabel
Rencana Tindak Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan/sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RSUBK 29	Hasil sumbangan digunakan untuk kepentingan pribadi dan serta pelaksanaan undian tanpa izin.	Mitigasi	Melaksanakan pengawasan bersama antara dinas sosial dan DPMPTSP sebagai langkah awal penertiban kegiatan PUB dan UGB.	Januari - Desember	Kabid Pemberdayaan sosial / PPTK
RSUBK 30	Pelaksanaan Penyediaan Bahan peralatan,makan minum peserta serta tempat kegiatan sosialisasi / seminar tidak sesuai kontrak	Mitigasi	Verifikator Penyedia Bahan peralatan , makan minum peserta, Logistik Memeriksa Kelengkapan Dokumen, Kesesuaian Pembayaran belanja makan minum dan Bukti Dukung/Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan	Januari - Desember	Kabid Pemberdayaan sosial / PPTK
RSUBK 31	Pelaksanaan Penyediaan Bahan peralatan,makan minum peserta serta tempat kegiatan sosialisasi / seminar tidak sesuai kontrak	Mitigasi	Verifikator Penyedia Bahan peralatan , makan minum peserta, Logistik Memeriksa Kelengkapan Dokumen, Kesesuaian Pembayaran belanja makan minum dan Bukti Dukung/Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan	Januari - Desember	Kabid Pemberdayaan sosial / PPTK
RSUBK 32	Pelaksanaan Penyediaan Bahan peralatan,makan minum peserta serta tempat kegiatan sosialisasi / seminar tidak sesuai kontrak	Mitigasi	Verifikator Penyedia Bahan peralatan , makan minum peserta, Logistik Memeriksa Kelengkapan Dokumen, Kesesuaian Pembayaran belanja makan minum dan Bukti Dukung/Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan	Januari - Desember	Kabid Pemberdayaan sosial / PPTK
RSUBK 33	Pelaksanaan Penyediaan Bahan peralatan,makan minum peserta serta tempat kegiatan sosialisasi / seminar tidak sesuai kontrak	Mitigasi	Verifikator Penyedia Bahan peralatan , makan minum peserta, Logistik Memeriksa Kelengkapan Dokumen, Kesesuaian Pembayaran belanja makan minum dan Bukti Dukung/Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan	Januari - Desember	Kabid Pemberdayaan sosial / PPTK

gg. Pemantauan Risiko
 Pemantauan Pelaksanaan Rencana Tidak Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel
Pemantauan RTP Risiko Program dan Kegiatan eselon III

No	Rencana Tindak Pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan												Pelaksana Pengendalian (Pihak yang melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko / Penanggung jawab Risiko
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Optimalisasi Peran Petugas Sosial di lapangan													Kabid Dayasos	Kepala Dinas
2	Optimalisasi pengawasan PBJ													Kabid Dayasos	Kepala Dinas
3	Memastikan kesiapan Tim													Kabid Dayasos	Kepala Dinas
4	Optimalisasi Kerjasama lintas sektor													Kabid Dayasos	Kepala Dinas
5	Melakukan proses pengawasan kinerja PSKS													Kabid Dayasos	Kepala Dinas

Keterangan : (Warna Hijau rencana pelaksanaan)
(Warna Kuning Realisasi pelaksanaan)

hh.Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pengendalian Risiko
Tabel
Pelaksanaan Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan eselon III Tahun 2025

No	Rencana Tindak Pengendalian Risiko	Tanggal Pelaksanaan	Keterjadian Risiko (Ya/Tidak)	Ouput Kegiatan Pengendalian	Hambatan/ Permasalahan dalam pelaksanaan pengendalian/ Risiko sisa yang belm dapat dikendalikan	Upaya telah dilakukan dalam penanganan risiko sisa
1	Optimalisasi Peran Petugas Sosial di lapangan	Februari – September 2025	Tidak	Data PSKS		
2	Optimalisasi pengawasan PBJ	Februari – September 2025	Tidak	PBJ dilaksanakan secara efektif dan efisien		
3	Memastikan kesiapan Tim	Februari – September 2025	Tidak	Jumlah PSKS yang mendapatkan sosialisasi		
4	Optimalisai Kerjasama lintas sektor dalam rehabilitasi sosial	Februari – September 2025	Tidak	Pembagian peran lintas sector lebih efektif		
5	Melaksanakan pengawasan kinerja PSKS	Februari – September 2025	Tidak	Jumlah PSKS yang aktif dalam penanganan masalah sosial		

ii. Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel
Capaian Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

No	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		% Capaian	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang Atau Barang	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin Undian Gratis Ber hadiah dan Pengumpulan Uang Atau Barang	1 Dokumen	16.006.900,-		12.695.000,-	100	79
2	Sub kegiatan Peningkatan kemampuan potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah orang yang mendapat peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat	20 orang	176.983.200,-		171.335.400	100	96

No	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		% Capaian	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
3	Sub Kegiatan peningkatan kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang meningkat kapasitasnya	20 orang	127.967.700,-		114.703.855,-	100	89
4	Peningkatan Kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial Kelembagaan masyarakat	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya	237 lembaga	4.804.084.600,-		4.753.231.000,-	100	98
5	Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat dari hasil Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	5 Sertifikat	24.276.080 ,-		10.649.700,-	100	43

3.2.5 Bidang Rehabilitasi Sosial

Nama Pejabat : Sunarko, S.ST., M.Si
NIP : 197109071994011002

jj. Program dan kegiatan yang dikelola sesuai Tabel berikut:

Tabel
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	100 %	24.809.200,00
1.1	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korbh Tindak Kkerasan dari Titik Debarkasi dai Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	5 orang	24.809.200,00
1.1.1	Sub Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korbh Tindak Kkerasan dari Titik Debarkasi dai Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	5 orang	24.809.200,00
II	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut USia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	100 %	4.441.865.290,00
II.1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sert Gelandangan Pengemis diluar panti sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS diluar panti sosial	1.488 orang	4.004.515.580,00
II.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemeuhan kebtuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	820 orang	3.113.579.020,00
II.1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	28.006.400,00
II.1.3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	443.848.400,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II.1.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	153.457.160,00
II.1.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kewenangan Kabupaten/Kota	118 orang	176.216.200,00
II.1.6	Pemberian layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten / kota	50 orang	43.087.000,00
II.1.7	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	46.321.400,00
II.2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	320 orang	437.349.710,00
II.2.1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten / Kota	25 orang	63.077.700,00
II.2.2	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten / Kota	75 orang	194.159.500,00
II.2.3	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	25.649.160,00
II.2.4	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	26.514.150,00
II.2.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	36.480.000,00
II.2.6	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	59.866.000,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II.2.7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 dok	31.603.200,00

kk. Hasil Identifikasi Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel
Hasil identifikasi Risiko Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC / C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik Risiko / Penanggungjawab / Pihak yang terkena dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	100 %	24.809.200,00	RPROG 3	Potensi gangguan ketertiban dan keamanan di shelter	Depresi karena ditelantarkan oleh pemberi kerja	Eksternal	UC	Keselamatan petugas dan fasilitas pelayanan di shelter	Kepala Dinas / Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.1	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kkerasan dari Titik Debarkasi dai Daerah Kabupaten/Ko ta untuk dipulangkan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	5 orang	24.809.200							

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC / C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik Risiko / Penanggungjawab / Pihak yang terkena dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	ke Desa/Kelurahan Asal										
1.1.1	Sub Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	5 orang	24.809.200	RSUBK 37	Potensi gangguan ketertiban dan keamanan di shelter	Depresi karena ditelantarkan oleh pemberi kerja	Eksternal	UC	Keselamatan petugas dan fasilitas pelayanan di shelter	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
II	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan	100 %	4.441.865.290,00	RPROG 4	Terdapat PMKS yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	PMKS tidak teridentifikasi atau tidak dilaporkan dengan baik	Internal dan Eksternal	UC/C	PMKS tidak dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya	Kepala Dinas / Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC / C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik Risiko / Penanggungjawab / Pihak yang terkena dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial									
II.1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sert Gelandangan Pengemis diluar panti sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS diluar panti sosial	1.488 orang	4.004.515.580,00							
II.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan	820 orang	3.113.579.200,00	RSUBK 38	Penerima manfaat sudah tidak memenuhi kriteria	Keterlambatan informasi dari petugas Puskesmas	Eksternal dan Internal	UC	Bantuan tidak tepat sasaran	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC / C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik Risiko / Penanggungjawab / Pihak yang terkena dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota									
II.1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	28.006.400,00	RSUBK 39	Terdapat kebutuhan sandang yang belum tersedia stok nya	Adanya usulan kebutuhan baru dari Masyarakat	Eksternal dan Internal	UC	Tidak terpenuhinya kebutuhan sandang PMKS	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
II.1.3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	443.848.400,00	RSUBK 40	Penyediaan alat bantu tidak tepat waktu	Kurang detilnya informasi profil kebutuhan penyandang disabilitas	Eksternal dan Internal	C	Tidak terpenuhinya kebutuhan alat bantu bagi disabilitas	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC / C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik Risiko / Penanggungjawab / Pihak yang terkena dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II.1.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	153.457.160,00	RSUBK 41	Kegagalan dalam upaya reunifikasi keluarga	Keluarga inti dan keluarga besar klien tidak ditemukan atau dalam kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan klien karena usia lanjut atau sakit menahun	Ekseternal dan Internal	C	Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar klien	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
II.1.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kewenangan Kabupaten/Kota	118 orang	176.216.200,00	RSUBK 42	Kurang optimalnya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social di shelter	Kurangnya ketersediaan SDM di shelter	Ekseternal dan Internal	UC	Semakin berkurangnya kemandirian PMKS	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
II.1.6	Pemberian layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten / kota	50 orang	43.087.000,00	RSUBK 43	Kasus kedaruratan tidak dapat segera direspon	Kekurangan jumlah sumber daya manusia	Ekseternal dan Internal	UC	Kurangnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Sosial	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC / C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik Risiko / Penanggungjawab / Pihak yang terkena dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II.1.7	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	46.321.400,00	RSUBK 44	Tidak terpenuhinya layanan rujukan bagi PMKS	UPTD penerima rujukan di Dinas Sosial Provinsi belum beroperasi atau dayaampungnya terbatas	Ekseternal dan Internal	UC	Meningkatnya jumlah PMKS kewenangan Provinsi yang dilayani di Kabupaten	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
II.2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	320 orang	437.349.710,00							
II.2.1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan	25 orang	63.077.700	RSUBK 45	Kasus kedaruratan tidak dapat	Kekurangan jumlah	Ekseternal dan Internal	UC	Kurangnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Sosial	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC / C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik Risiko / Penanggungjawab / Pihak yang terkena dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		kedaruratan kewenangan Kabupaten / Kota				segera direspon	sumber daya manusia				Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
II.2.2	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten / Kota	75 orang	194.159.500,00	RSUBK 46	Jumlah porsi permakanan yang disediakan tidak mencukupi	Lonjakan kasus ABH yang dititipkan ke RPTC	Ekseternal dan Internal	UC	Tidak terpenuhinya kebutuhan permakanan PMKS	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
II.2.3	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	25.649.160,00	RSUBK 47	Terdapat kebutuhan sandang yang belum tersedia stoknya	Adanya usulan kebutuhan baru dari Masyarakat	Ekseternal dan Internal	UC	Tidak terpenuhinya kebutuhan sandang PMKS	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC / C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik Risiko / Penanggungjawab / Pihak yang terkena dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II.2.4	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	26.514.150,00	RSUBK 48	Penyediaan alat bantu tidak tepat waktu	Keterlambatan proses pengadaan alat bantu	Eksternal dan Internal	UC	Tidak terpenuhinya kebutuhan alat bantu PMKS	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
II.2.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	36.480.000,00	RSUBK 49	Tingkat kemandirian PMKS yang masih kurang	Rendahnya pemberdayaan PMKS	Eksternal dan Internal	UC	Kondisi PMKS yang semakin memburuk	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
II.2.6	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	59.866.000,00	RSUBK 50	Kegagalan dalam upaya reunifikasi keluarga	Kurangnya kesadaran keluarga dalam memahami dan menerima kondisi anggota keluarga yang mengalami permasalahan sosial	Eksternal dan Internal	UC	Meningkatnya putus hubungan antara anggota keluarga dengan PMKS	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC / C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik Risiko / Penanggungjawab / Pihak yang terkena dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II.2.7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 dokumen	31.603.200,00	RSUBK 51	Kurang optimalnya rehabilitasi social PMKS	Masih kurangnya MoU dengan lembaga-lembaga pelayanan rehabilitasi sosial	Eksternal dan Internal	C	Kurangnya pemenuhan kebutuhan PMKS	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK

II. Hasil Analisis Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut

Tabel
Hasil Analisis Risiko Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yang sudah ada (Kepatuhan/ Aturan/ SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada / Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai /Tidak memadai	Efektif/ Tidak efektif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
RPROG 3	Potensi gangguan ketertiban dan keamanan di shelter disebabkan oleh depresi karena ditelantarkan oleh pemberi kerja	2	1	2	Sangat rendah	Penugasan petugas Pendamping Rehabilitasi Sosial untuk melakukan pendampingan dan bimbingan di shelter	Memadai	Efektif	Tidak
RSUBK 37	Potensi gangguan ketertiban dan keamanan di shelter disebabkan oleh depresi karena ditelantarkan oleh pemberi kerja	2	1	2	Sangat rendah	Penugasan petugas Pendamping Rehabilitasi Sosial untuk melakukan pendampingan dan bimbingan di shelter	Memadai	Efektif	Tidak
RPROG 4	Terdapat PMKS yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya disebabkan oleh PMKS tidak teridentifikasi atau tidak dilaporkan dengan baik	3	3	9	Rendah	Penerapan aplikasi “Pelaporan Mandiri Masalah Sosial”	Memadai	Efektif	Ada

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yang sudah ada (Kepatuhan/ Aturan/ SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada / Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai /Tidak memadai	Efektif/ Tidak efektif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
RSUBK 38	Penerima manfaat sudah tidak memenuhi kriteria disebabkan oleh keterlambatan informasi dari petugas Puskesmas	3	2	6	Rendah	Memastikan penerima manfaat memenuhi kriteria pada saat distribusi	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 39	Terdapat kebutuhan sandang yang belum tersedia stok nya disebabkan oleh adanya usulan kebutuhan baru dari masyarakat	4	3	12	Sedang	Mengusulkan pemenuhan kebutuhan sandang yang belum tersedia melalui BAZNAS Kutai Kartanegara	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 40	Penyediaan alat bantu tidak tepat waktu disebabkan oleh kurang detilnya informasi profil kebtuhan penyandang disabilitas	4	3	12	Sedang	Bekerjasama dengan PPDI Kutai Kartanegara untuk menyeiakan Profil Penyandang Disabilitas	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 41	Kegagalan dalam upaya reunifikasi keluarga disebabkan oleh keluarga inti dan keluarga besar klien tidak ditemukan atau dalam kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan klien karena usia lanjut	5	4	20	Tinggi	Memberikan pelayanan rehabilitasi social didalam shelter sebelum dirujuk ke Dinas Sosial Provinsi	Memadai	Efektif	Tidak Ada

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yang sudah ada (Kepatuhan/ Aturan/ SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada / Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai /Tidak memadai	Efektif/ Tidak efektif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	atau sakit menahun								
RSUBK 42	Kurang optimalnya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social di shelter disebabkan oleh kurangnya ketersediaan SDM di shelter	5	4	20	Tinggi	Membagi tugas Pendamping Rehabilitasi Sosial untuk memberikan bimbingan di shelter	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 43	Kasus kedaruratan tidak dapat segera direspon disebabkan oleh kekurangan jumlah sumber daya manusia	4	3	12	Sedang	Memberikan tugas tambahan kepada petugas Fungsional Pelaksana	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 44	Tidak terpenuhinya layanan rujukan bagi PMKS disebabkan oleh UPTD penerima rujukan di Dinas Sosial Provinsi belum beroperasi atau daya tampungnya terbatas	5	4	20	Tinggi	Optimalisasi fungsi UPTD Loka Bina Karya sebagai shelter	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 45	Kasus kedaruratan tidak dapat segera direspon disebabkan oleh	4	3	12	Sedang	Memberikan tugas tambahan kepada petugas Fungsional Pelaksana	Memadai	Efektif	Tidak Ada

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yang sudah ada (Kepatuhan/ Aturan/ SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada / Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai /Tidak memadai	Efektif/ Tidak efektif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kekurangan jumlah sumber daya manusia								
RSUBK 46	Jumlah porsi permakanan yang disediakan tidak mencukupi disebabkan oleh lonjakan kasus ABH yang dititipkan ke RPTC	2	2	4	Sangat rendah	Koordinasi dengan Penyidik Kepolisian	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 47	Terdapat kebutuhan sandang yang belum tersedia stok nya disebabkan oleh adanya usulan kebutuhan baru dari Masyarakat	3	2	6	Rendah	Melakukan penyesuaian kebutuhan pada daftar belanja	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 48	Penyediaan alat bantu tidak tepat waktu disebabkan oleh Keterlambatan proses pengadaan alat bantu	4	3	12	Sedang	Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 49	Tingkat kemandirian PMKS yang masih kurang disebabkan oleh Rendahnya pemberdayaan PMKS	4	3	12	Sedang	Melakukan kunjungan ke tempat PMKS	Memadai	Efektif	Tidak Ada

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yang sudah ada (Kepatuhan/ Aturan/ SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada / Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai /Tidak memadai	Efektif/ Tidak efektif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
RSUBK 50	Kegagalan dalam upaya reunifikasi keluarga disebabkan oleh Kurangnya kesadaran keluarga dalam memahami dan menerima kondisi anggota keluarga yang mengalami permasalahan sosial	2	1	2	Sangat Rendah	Mengoptimalkan komunikasi dengan daerah asal	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 51	Tidak terlaksananya rehabilitasi sosial PMKS disebabkan oleh Masih kurangnya MoU dengan lembaga-lembaga pelayanan rehabilitasi social	3	3	9	Rendah	Koordinasi dengan Lembaga/mitra dalam pelaksanaan rehabilitasi social	Memadai	Efektif	Tidak Ada

mm. Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan Eselon III sebagai berikut:

Tabel
Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat	Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/ Dihindari/ Dibagi)	Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko Setelah Pengendalian			
							K	D	Skor	Level risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RPROG 3	Potensi gangguan ketertiban dan keamanan di shelter disebabkan oleh depresi karena ditelantarkan oleh pemberi kerja	2	Sangat rendah	6	Mitigasi	Penugasan petugas Pendamping Rehabilitasi Sosial untuk melakukan pendampingan dan bimbingan di shelter	2	1	2	Sangat Rendah
RSUBK 37	Potensi gangguan ketertiban dan keamanan di shelter disebabkan oleh depresi karena ditelantarkan oleh pemberi kerja	2	Sangat rendah	6	Mitigasi	Penugasan petugas Pendamping Rehabilitasi Sosial untuk melakukan pendampingan dan bimbingan di shelter	2	1	2	Sangat Rendah
RPROG 4	Terdapat PMKS yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya disebabkan oleh PMKS tidak teridentifikasi atau tidak dilaporkan dengan baik	9	Rendah	3	Mitigasi	Penerapan aplikasi "Pelaporan Mandiri Masalah Sosial"	3	3	9	Rendah
RSUBK 38	Penerima manfaat sudah tidak memenuhi kriteria disebabkan oleh keterlambatan informasi dari petugas Puskesmas	6	Rendah	4	Mitigasi	Memastikan penerima manfaat memenuhi kriteria pada saat distribusi	2	1	2	Sangat Rendah

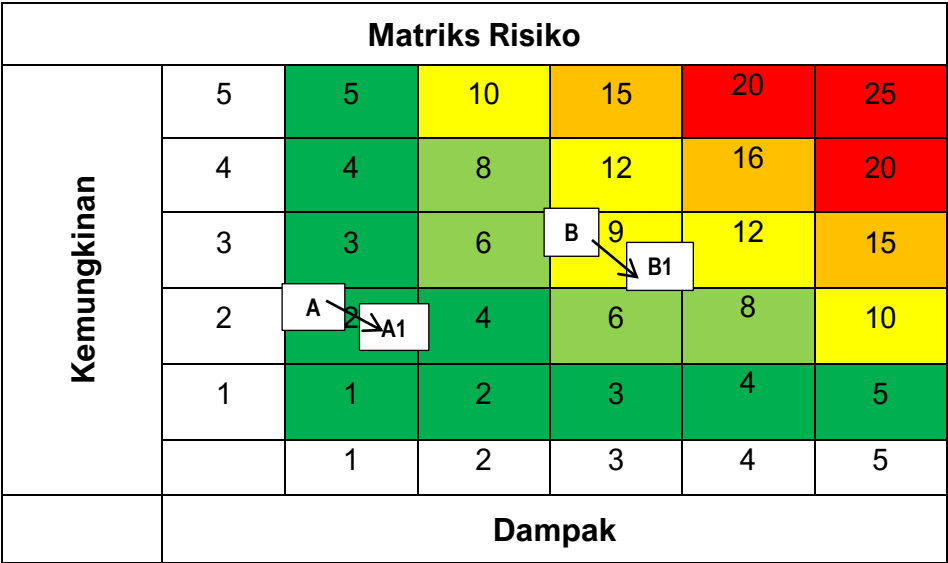
Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat	Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/ Dihindari/ Dibagi)	Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko Setelah Pengendalian			
							K	D	Skor	Level risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RSUBK 39	Terdapat kebutuhan sandang yang belum tersedia stok nya disebabkan oleh adanya usulan kebutuhan baru dari masyarakat	12	Sedang	2	Mitigasi	Mengusulkan pemenuhan kebutuhan sandang yang belum tersedia melalui BAZNAS Kutai Kartanegara	4	3	12	Sedang
RSUBK 40	Penyediaan alat bantu tidak tepat waktu disebabkan oleh kurang detilnya informasi profil kebtuhan penyandang disabilitas	12	Sedang	2	Mitigasi	Bekerjasama dengan PPDI Kutai Kartanegara untuk menyeiakan Profil Penyandang Disabilitas	4	3	12	Sedang
RSUBK 41	Kegagalan dalam upaya reunifikasi keluarga disebabkan oleh keluarga inti dan keluarga besar klien tidak ditemukan atau dalam kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan klien karena usia lanjut atau sakit menahun	20	Tinggi	1	Mitigasi	Memberikan pelayanan rehabilitasi social didalam shelter sebelum dirujuk ke Dinas Sosial Provinsi	5	1	5	Sangat Rendah
RSUBK 42	Kurang optimalnya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social di shelter disebabkan oleh kurangnya ketersediaan SDM di shelter	20	Tinggi	1	Mitigasi	Membagi tugas Pendamping Rehabilitasi Sosial untuk memberikan bimbingan di shelter	5	3	15	Sedang

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat	Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/ Dihindari/ Dibagi)	Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko Setelah Pengendalian			
							K	D	Skor	Level risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RSUBK 43	Kasus kedaruratan tidak dapat segera direspon disebabkan oleh kekurangan jumlah sumber daya manusia	12	Sedang	2	Mitigasi	Memberikan tugas tambahan kepada petugas Fungsional Pelaksana	2	2	4	Sangat Rendah
RSUBK 44	Tidak terpenuhinya layanan rujukan bagi PMKS disebabkan oleh UPTD penerima rujukan di Dinas Sosial Provinsi belum beroperasi atau daya tampungnya terbatas	20	Tinggi	1	Mitigasi	Optimalisasi fungsi UPTD Loka Bina Karya sebagai shelter	2	2	4	Sangat Rendah
RSUBK 45	Kasus kedaruratan tidak dapat segera direspon disebabkan oleh kekurangan jumlah sumber daya manusia	12	Sedang	2	Mitigasi	Memberikan tugas tambahan kepada petugas Fungsional Pelaksana	2	2	4	Sangat Rendah
RSUBK 46	Jumlah porsi permakanan yang disediakan tidak mencukupi disebabkan oleh lonjakan kasus ABH yang dititipkan ke RPTC	4	Sangat rendah	5	Mitigasi	Koordinasi dengan Penyidik Kepolisian	1	1	1	Sangat Rendah
RSUBK 47	Terdapat kebutuhan sandang yang belum tersedia stok nya disebabkan oleh	6	Rendah	4	Mitigasi	Melakukan penyesuaian kebutuhan pada daftar belanja	3	2	6	Rendah

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat	Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/ Dihindari/ Dibagi)	Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko Setelah Pengendalian			
							K	D	Skor	Level risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	adanya usulan kebutuhan baru dari Masyarakat									
RSUBK 48	Penyediaan alat bantu tidak tepat waktu disebabkan oleh Keterlambatan proses pengadaan alat bantu	12	Sedang	2	Mitigasi	Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan	2	2	4	Sangat Rendah
RSUBK 49	Tingkat kemandirian PMKS yang masih kurang disebabkan oleh Rendahnya pemberdayaan PMKS	12	Sedang	2	Mitigasi	Melakukan kunjungan ke tempat PMKS	2	2	4	Sangat Rendah
RSUBK 50	Kegagalan dalam upaya reunifikasi keluarga disebabkan oleh Kurangnya kesadaran keluarga dalam memahami dan menerima kondisi anggota keluarga yang mengalami permasalahan sosial	2	Sangat Rendah	6	Mitigasi	Mengoptimalkan komunikasi dengan daerah asal	2	1	2	Sangat Rendah
RSUBK 51	Tidak terlaksananya rehabilitasi sosial PMKS disebabkan oleh Masih kurangnya MoU dengan lembaga-lembaga pelayanan rehabilitasi sosial	9	Rendah	3	Mitigasi	Koordinasi dengan Lembaga / mitra dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial	2	2	4	Sangat Rendah

nn.Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan

Gambar
Matriks Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan



Ket. A = RPROG3 (sebelum penanganan Risiko)
 A1 = RPROGR3 (setelah penanganan Risiko)

 B = RPROG4 (sebelum penanganan Risiko)
 B1 = RPROGR4 (setelah penanganan Risiko)

oo.Respon dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko

Respon dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Program dan Kegiatan eselon III sesuai dengan Tabel berikut:

Tabel
Rencana Tindak Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan/sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RPROG 3	Potensi gangguan ketertiban dan keamanan di shelter disebabkan oleh depresi karena ditelantarkan oleh pemberi kerja	Mitigasi	Penugasan petugas Pendamping Rehabilitasi Sosial untuk melakukan pendampingan dan bimbingan di shelter	Januari - Desember	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
RSUBK 37	Potensi gangguan ketertiban dan keamanan di shelter disebabkan oleh depresi karena ditelantarkan oleh pemberi kerja	Mitigasi	Penugasan petugas Pendamping Rehabilitasi Sosial untuk melakukan pendampingan dan bimbingan di shelter	Januari - Desember	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
RPROG 4	Terdapat PMKS yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya disebabkan oleh PMKS tidak teridentifikasi atau tidak dilaporkan dengan baik	Mitigasi	Penerapan aplikasi “Pelaporan Mandiri Masalah Sosial”	Januari - Desember	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RSUBK 38	Penerima manfaat sudah tidak memenuhi kriteria disebabkan oleh keterlambatan informasi dari petugas Puskesmas	Mitigasi	Memastikan penerima manfaat memenuhi kriteria pada saat distribusi	Januari - Desember	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
RSUBK 39	Terdapat kebutuhan sandang yang belum tersedia stok nya disebabkan oleh adanya usulan kebutuhan baru dari masyarakat	Mitigasi	Mengusulkan pemenuhan kebutuhan sandang yang belum tersedia melalui BAZNAS Kutai Kartanegara	Januari - Desember	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
RSUBK 40	Penyediaan alat bantu tidak tepat waktu disebabkan oleh kurang detilnya informasi profil kebutuan penyandang disabilitas	Mitigasi	Bekerjasama dengan PPDI Kutai Kartanegara untuk menyeiakan Profil Penyandang Disabilitas	Januari - Desember	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
RSUBK 41	Kegagalan dalam upaya reunifikasi keluarga disebabkan oleh keluarga inti dan keluarga besar klien tidak ditemukan atau dalam kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan klien karena usia lanjut atau sakit menahun	Mitigasi	Memberikan pelayanan rehabilitasi social didalam shelter sebelum dirujuk ke Dinas Sosial Provinsi	Januari - Desember	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
RSUBK 42	Kurang optimalnya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social di shelter disebabkan oleh kurangnya ketersediaan SDM di shelter	Mitigasi	Membagi tugas Pendamping Rehabilitasi Sosial untuk memberikan bimbingan di shelter	Januari - Desember	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
RSUBK 43	Kasus kedaruratan tidak dapat segera direspon disebabkan oleh kekurangan jumlah sumber daya manusia	Mitigasi	Memberikan tugas tambahan kepada petugas Fungsional Pelaksana	Januari - Desember	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
RSUBK 44	Tidak terpenuhinya layanan rujukan bagi PMKS disebabkan oleh UPTD penerima rujukan di Dinas Sosial Provinsi belum beroperasi atau daya tampungnya terbatas	Mitigasi	Optimalisasi fungsi UPTD Loka Bina Karya sebagai shelter	Januari - Desember	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
RSUBK 45	Kasus kedaruratan tidak dapat segera direspon disebabkan oleh kekurangan jumlah sumber daya manusia	Mitigasi	Memberikan tugas tambahan kepada petugas Fungsional Pelaksana	Januari - Desember	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
RSUBK 46	Jumlah porsi permakanan yang disediakan tidak mencukupi disebabkan	Mitigasi	Koordinasi dengan Penyidik Kepolisian	Januari - Desember	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	oleh lonjakan kasus ABH yang dititipkan ke RPTC				
RSUBK 47	Terdapat kebutuhan sandang yang belum tersedia stok nya disebabkan oleh adanya usulan kebutuhan baru dari Masyarakat	Mitigasi	Melakukan penyesuaian kebutuhan pada daftar belanja	Januari - Desember	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
RSUBK 48	Penyediaan alat bantu tidak tepat waktu disebabkan oleh Keterlambatan proses pengadaan alat bantu	Mitigasi	Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan	Januari - Desember	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
RSUBK 49	Tingkat kemandirian PMKS yang masih kurang disebabkan oleh Rendahnya pemberdayaan PMKS	Mitigasi	Melakukan kunjungan ke tempat PMKS	Januari - Desember	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
RSUBK 50	Kegagalan dalam upaya reunifikasi keluarga disebabkan oleh Kurangnya kesadaran keluarga dalam memahami dan menerima kondisi anggota keluarga yang mengalami permasalahan sosial	Mitigasi	Mengoptimalkan komunikasi dengan daerah asal	Januari - Desember	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK
RSUBK 51	Tidak terlaksananya rehabilitasi sosial PMKS disebabkan oleh Masih kurangnya MoU dengan lembaga-lembaga pelayanan rehabilitasi social	Mitigasi	Koordinasi dengan Lembaga / mitra dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial	Januari - Desember	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan / PPTK

pp.Pemantauan Risiko
Pemantauan Pelaksanaan Rencana Tidak Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel
Pemantauan RTP Risiko Program dan Kegiatan eselon III

No	Rencana Tindak Pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan												Pelaksana Pengendalian (Pihak yang melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko / Penanggungjawab Risiko
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Penugasan petugas Pendamping Rehabilitasi Sosial untuk melakukan pendampingan dan bimbingan di shelter													Kabid Rehsos dan Migran KTK	Kepala Dinas

2	Memastikan penerima manfaat memenuhi kriteria pada saat distribusi														Kabid Rehsos dan Migran KTK	Kepala Dinas
3	Mengusulkan pemenuhan kebutuhan sandang yang belum tersedia melalui BAZNAS Kutai Kartanegara														Kabid Rehsos dan Migran KTK	Kepala Dinas
4	Bekerjasama dengan PPDI Kutai Kartanegara untuk menyeiakan Profil Penyandang Disabilitas														Kabid Rehsos dan Migran KTK	Kepala Dinas
5	Memberikan pelayanan rehabilitasi social didalam shelter sebelum dirujuk ke Dinas Sosial Provinsi														Kabid Rehsos dan Migran KTK	Kepala Dinas
6	Memberikan tugas tambahan kepada petugas Fungsional Pelaksana														Kabid Rehsos dan Migran KTK	Kepala Dinas
7	Optimalisasi fungsi UPTD Loka Bina Karya sebagai shelter														Kabid Rehsos dan Migran KTK	Kepala Dinas
8	Koordinasi dengan Penyidik Kepolisian														Kabid Rehsos dan Migran KTK	Kepala Dinas
9	Melakukan penyesuaian kebutuhan pada daftar belanja														Kabid Rehsos dan Migran KTK	Kepala Dinas
10	Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan														Kabid Rehsos dan Migran KTK	Kepala Dinas
11	Melakukan kunjungan ke tempat PMKS														Kabid Rehsos dan Migran KTK	Kepala Dinas
12	Mengoptimalkan komunikasi dengan daerah asal														Kabid Rehsos dan Migran KTK	Kepala Dinas
13	Koordinasi dengan Lembaga / mitra dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial														Kabid Rehsos dan Migran KTK	Kepala Dinas

Keterangan : (Warna Hijau rencana pelaksanaan)
(Warna Kuning Realisasi pelaksanaan)

qq. Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pengendalian Risiko
Tabel

Pelaksanaan Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan eselon III Tahun 2025

No	Rencana Tindak Pengendalian Risiko	Tanggal Pelaksanaan	Keterjadian Risiko (Ya/Tidak)	Ouput Kegiatan Pengendalian	Hambatan/ Permasalahan dalam pelaksanaan pengendalian/ Risiko sisa yang belum dapat dikendalikan	Upaya telah dilakukan dalam penanganan risiko sisa
1	Penugasan petugas Pendamping Rehabilitasi Sosial untuk melakukan pendampingan dan bimbingan di shelter	Februari – Maret 2025	Tidak	Pelaksanaan pendampingan sosial oleh Pendamping Rehsos	Terdapat ODGJ terlantar yang belum mampu mengingat asal usulnya	
2	Memastikan penerima manfaat memenuhi kriteria pada saat distribusi	Februari – Maret 2025	Ya	Ditemukan Penerima Manfaat yang tidak memenuhi kriteria	Tidak ada hambatan	Penerima Manfaat dikeluarkan dari daftar penerima bantuan
3	Mengusulkan pemenuhan kebutuhan sandang yang belum tersedia melalui BAZNAS Kutai Kartanegara		Tidak	Tidak ada kejadian	Tidak ada hambatan	
4	Bekerjasama dengan PPD Kutai Kartanegara untuk menyeiakan Profil Penyandang Disabilitas		Tidak			
5	Memberikan pelayanan rehabilitasi sosial didalam shelter sebelum dirujuk ke Dinas Sosial Provinsi	Januari – Maret 2025	Tidak	Pelayanan rehabilitasi sosial di dalam shelter	Kekurangan sumber daya manusia aparatur	
6	Memberikan tugas tambahan kepada petugas Fungsional Pelaksana	Januari – Maret 2025	Tidak	Pelaksanaan tugas tambahan oleh Fungsional Pelaksana	Tidak ada hambatan	
7	Optimalisasi fungsi UPTD Loka Bina Karya sebagai shelter	Januari – Maret 2025	Tidak	Pelayanan rehabilitasi sosial di dalam shelter	Kekurangan sumber daya manusia aparatur	
8	Koordinasi dengan Penyidik Kepolisian	Januari – Maret 2025	Tidak	ABH yang dititipkan ke shelter berkurang	Kondisi bangunan shelter RPTC mulai kurang layak	
9	Melakukan penyesuaian kebutuhan pada daftar belanja					
10	Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan	Februari 2025	Tidak	Distribusi bantuan sesuai jadwal	Tidak ada hambatan	
11	Melakukan kunjungan ke tempat PMKS	Februari – Maret 2025	Tidak	Informasi profil pemerlu manfaat		
12	Mengoptimalkan komunikasi dengan daerah asal	Januari – Maret 2025	Tidak	Reunifikasi ke daerah asal	Beberapa daerah belum menemukan informasi keluarga klien	
13	Koordinasi dengan Lembaga / mitra dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial	Januari – Maret 2025	Tidak	Pelayanan sosial anak disabilitas di Asrama SLB N Tenggarong	Tidak ada hambatan	

rr. Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel
Capaian Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

No	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Uraian Indikator	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		% Capaian	
			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
I	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	100 %	24.809.200,00	40%	15.930.000,00	40%	64,21%
1.1	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	5 orang	24.809.200	5 orang	15.930.000,00	100%	64,21%
1.1.1	Sub Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	5 orang	24.809.200	5 orang	15.930.000,00	100%	64,21%
II	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	100 %	4.441.865.290,00	746 prang	3.676.728.280,00	40,15%	82,77%

II.1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS diluar Panti Sosial	1.180 orang	4.004.515.580,00	1.171 orang	3.412.331.680,00	99,23%	85,21%
II.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	820 orang	3.113.579.200,00	820 orang	3.042.240.975,00	100 %	97,71%
II.1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	28.006.400,00	30 orang	23.730.000,00	100%	84,73%
II.1.3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	443.848.400,00	41 orang	21.851.401,00	82%	4,92%
II.1.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	55 orang	153.457.160,00	55 orang	135.432.003,00	100%	88,25%
II.1.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	176.216.200,00	75 orang	125.595.000,00	100%	71,27%

II.1.6	Pemberian layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten / kota	50 orang	43.087.000,00	50 orang	24.941.000,00	100%	57,89%
II.1.7	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	46.321.400,00	100 orang	38.541.300,00	100%	83,20%
II.2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	320 orang	437.349.710,00	186 orang	264.396.600,00	58,12%	60,45%
II.2.1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten / Kota	75 orang	63.077.700,00	67 orang	52.281.500,00	89,33 %	82,88%
II.2.2	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten / Kota	75 orang	194.159.500,00	75 orang	98.201.300,00	100%	50,58%
II.2.3	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	25.649.160,00	15 orang	3.665.400,00	75%	14,29%
II.2.4	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	3 orang	26.514.150,00	-	3.247.500,00	-	12,25%
II.2.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	36.480.000,00	8 orang	27.192.900,00	16%	74,54%
II.2.6	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	59.866.000,00	21 orang	51.956.000,00	21%	86,79%

II.2.7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 dokumen	31.603.200,00	1 dokumen	27.852.000,00	50%	88,13%

Unit Pengelola Risiko Eselon IV

3.3.1 Kasubag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Nama Pejabat : Serapul Anam, SE., MM
NIP : 19681011 199403 1 007

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dikelola sesuai Tabel berikut:

Tabel
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	82	2.930.136.562,00
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			121.140.500,00
1.1	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	12.500.000,00
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	25.000.000,00
1.3	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	36.900.000,00
1.4	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	46.740.500,00
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			19.364.800,00
2.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-
2.2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	19.364.800,00

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			774.861.401,00
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah barang	5 Paket	5.110.200,00
3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya Alat Tulis Kantor	20 Paket	64.774.506,00
3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	155.886.225,00
3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	339.194.710,00
3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	61.802.500,00
3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	94.551.660,00
3.7	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen	13.541.600,00
3.8	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			101.439.134,00
4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	101.439.134,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.312.888.327,00
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.299.000,00

5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	316.485.288,00
5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	12 Bulan	994.104.039,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			630.442.400,00
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan Pajak	33 Unit	150.000.000,00
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan dan Pajak	5 Unit	150.000.000,00
6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan alat dan mesin	12 Unit	75.000.000,00
6.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitas	2 Unit	227.412.400,00
6.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	28.030.000,00

b. Hasil Identifikasi Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel
Hasil identifikasi Risiko Program, Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC / C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik Risiko / Penanggungjawab / Pihak yang terkena dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	82	2.930.136.562,00							
1	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			121.140.500,00							
1.1	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	12.500.00,00	RSUBK 5	Laporan BMD yang tidak valid	Asset yang tidak tercatat	Ekseternal dan Internal	UC	Pemerintah Daerah Kesulitan Konsolidasi Laporan Keuangan	Sekretaris / PPTK

1.2	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,00		Laporan BMD yang tidak valid	Asset yang tidak tercatat	Internal dan Eksternal	UC/C	Pemerintah Daerah Kesulitan Konsolidasi Laporan Keuangan	Sekretaris / PPTK
1.3	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	36.900.000,00		Laporan BMD yang tidak valid	Asset yang tidak tercatat	Internal dan Eksternal	UC/C	Pemerintah Daerah Kesulitan Konsolidasi Laporan Keuangan	Sekretaris / PPTK
1.4	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	46.740.500,00		Laporan BMD yang tidak valid	Asset yang tidak tercatat	Internal dan Eksternal	UC/C	Pemerintah Daerah Kesulitan Konsolidasi Laporan Keuangan	Sekretaris / PPTK
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			19.364.800,00							
2.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	19.364.800,00	RSUBK 6	Belum semua data ASN terkumpul , menjadi database	Keterlambatan proses pengadaan permakanan	Internal	C	Tidak Dapat Meningkatkan SDM	Sekretaris / PPTK

3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			774.861.401,00							
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah barang	5 Paket	5.110.200,00	RSUBK 7	Pencahayaan ruangan kerja dan lingkungan kantor tidak baik	Tidak tersedia komponen instalasi listrik dan penerangan	Internal	C	Tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik	Sekretaris / PPTK
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	20 Paket	64.774.506,00	RSUBK 8	Kemampuan OPD yang belum dapat memenuhi kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	Internal	C	Tidak terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Sekretaris / PPTK
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	155.886.225,00	RSUBK 9	Perhitungan Kurang terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan logistik yang dibutuhkan	Internal	UC	Kondisi PMKS yang semakin memburuk	Sekretaris / PPTK

3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	3 Paket	339.194.710,00	RSUBK 10	Tidak terpenuhinya semua Barang Cetak dan Penggandaan	Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	Internal	C	Tidak terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan	Sekretaris / PPTK
3.5	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Barang	2 Paket	61.802.500,00	RSUBK 11	Tidak terpenuhinya kebutuhan bahan / material pendukung kegiatan	Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan material yang dibutuhkan	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan acara yang memerlukan bahan / material	Sekretaris/PPTK
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan	200 Laporan	94.551.660,00	RSUBK 12	Perjalanan dinas yang tidak efisien dan efektif	Perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan	Internal	C	Pemborosan penggunaan anggaran	Sekretaris/PPTK
3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip	50 Dokumen	13.541.600,00	RSUBK 13	Kehilangan dokumen arsip yang diperlukan	Tidak tertatanya arsip pada dinas sosial	Internal	C	Kesulitan dalam pencarian dokumen arsip yang diperlukan	Sekretaris/PPTK
3.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	RSUBK 14	Tidak terlaksanannya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Keterbatasan sumber daya yang ada	Internal	C	Masih kurangnya akses pelayanan kepada masyarakat karena masih dilakukan secara manual	Sekretaris/PPTK

4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"			101.439.134,00							
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang	10 Unit	101.439.134,00	RSUBK 15	Tidak terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin penunjang tugas dan fungsi dinas	Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	Internal	C	Tidak maksimalnya kinerja ASN	Sekretaris/PPTK
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.312.888.327,00							
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah barang berupa meterai dan kertas cover	1 Laporan	2.299.000,00	RSUBK 16	Terlambatnya proses administrasi yang membutuhkan meterai, dll	Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta ketersediaan anggaran belanja jasa surat menyurat yang tidak sesuai	Internal	C	Terhambatnya proses surat-menyurat kantor	Sekretaris/PPTK
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	316.485.288,00	RSUBK 17	Sanksi Denda / Pemutusan sambungan air, listrik, telepon / internet dan TV kabel	Keterlambatan pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internal	C	Terhambatnya aktivitas / pelayanan / kebutuhan kantor	Sekretaris/PPTK

5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	994.104.039,00	RSUBK 18	Kekurangan pagu anggaran pembayaran gaji THL	Adanya penambahan tenaga harian lepas wakar dan tenaga kebersihan	Internal	C	Kinerja Pegawai Non PNS Kurang Maksimal	Sekretaris/PPTK
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			630.442.400,00							
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan Pajak	33 Unit	150.000.000,00	RSUBK 19	Terhambatnya aktivitas pengguna kendaraan dinas perorangan dan jabatan	Pemeliharaan kerusakan yang tidak dapat diprediksi	Internal	C	Minimnya Kendaraan Dinas Jabatan untuk menunjang Tufoksi OPD	Sekretaris/PPTK
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan dan Pajak	5 Unit	150.000.000,00	RSUBK 20	Tidak maksimalnya pelayanan di lapangan	Kendaraan dinas operasional / lapangann yang tidak terpelihara	Internal	C	Minimnya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk menunjang Tufoksi OPD	Sekretaris/PPTK
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan alat dan mesin	12 Unit	75.000.000,00	RSUBK 21	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan perlaatan / mesin	Peralatan dan mesin yang tidak dipelihara/dirawat	Internal	C	kerusakan peralatan dan mesin	Sekretaris/PPTK
6.4	Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 Unit	227.412.400,00	RSUBK 22	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Internal	C	kerusakan fasilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretaris/PPTK

	Bangunan Lainnya	Dipelihata/Rehabilitas					Dipelihata/Rehabilitas				
6.5	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	28.030.000,00	RSUBK 23	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Internal	C	kerusakan peralatan dan mesin Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretaris/PPTK

c. Hasil Analisis Risiko Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Tabel berikut

Tabel
Hasil Analisis Risiko Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yang sudah ada (Kepatuhan/ Aturan/ SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada / Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai /Tidak memadai	Efektif/ Tidak efektif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
RSUBK 5	Kebutuhan Barang Milik Daerah pada OPD kurang terpenuhi secara maksimal	3	4	12	Sedang	Melaksanakan proses RKBMD yang lebih selektif dalam pengadaan Barang Milik Daerah	memadai	Efektif	tidak
RSUBK 5	Timbulnya penyalahgunaan,keterlambatan pengembalian dan kerusakan atau kehilangan BMD yang dipinjam pakaikan	3	4	12	Sedang	Melaksanakan perencanaan,penatausahaan,pengawasan dan pengendalian BMD sesuai dengan ketentuan hukum	memadai	efektif	tidak
RSUBK 5	Laporan BMD yang tidak valid disebabkan oleh Asset yang tidak tercatat	3	4	12	Sedang	Pengurus Barang melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara Pengeluaran dan mencatat setiap belanja asset dalam laporan barang	Memadai	Efektif	Tidak
	Laporan BMD yang tidak valid disebabkan oleh Asset yang tidak tercatat	3	4	12	Sedang	Pengurus Barang melakukan rekonsiliasi dengan Seluruh Pengguna Barang yang terdata dan mendata ulang yang tidak terdapat didalam data	Memadai	Efektif	Tidak
RSUBK 6	Data ASN yang tidak update disebabkan oleh Belum semua data ASN terkumpul menjadi database	3	4	12	Sedang	Surat pengantar penyerahan dokumen kepegawaian semua ASN	Memadai	Efektif	Ada
RSUBK 7	Pencahayaan ruangan kerja dan lingkungan kantor tidak baik disebabkan oleh Tidak tersedia komponen instalasi listrik dan penerangan	2	2	4	Sangat Rendah	Pemeliharaan yang baik dan pengadaan alat penerangan yang berkualitas dan sesuai standar Nasional	Memadai	Efektif	Tidak Ada

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yang sudah ada (Kepatuhan/ Aturan/ SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada / Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai /Tidak memadai	Efektif/ Tidak efektif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
RSUBK 8	Kemampuan OPD yang belum dapat memenuhi kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	3	3	9	Sedang	Penggunaan peralatan dan perlengkapan yang efektif dan efisien	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 9	Kurang terpenuhinya Bahan Logisti Kantor disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan logistik yang dibutuhkan	2	2	4	Sangat Rendah	Penyaluran bahan logistik yang sesuai dan tepat waktu, efektif dan efisien	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 10	Tidak terpenuhinya semua Barang Cetakan dan Penggandaan disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	2	2	4	Sanagat Rendah	Tanda terima penyerahan barang cetakan	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 11	Tidak terpenuhinya kebutuhan bahan / material pendukung kegiatan disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan material yang dibutuhkan	2	2	4	Sanagat Rendah	Menginventarisir kebutuhan bahan material secara selektif agar efektif dan efisien	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 12	Perjalanan dinas yang tidak efisien dan efektif disebabkan oleh Perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan	3	3	9	Sedang	Melakukan inventarisir jadwal undangan / kegiatan yang akan dihadiri	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 13	Kehilangan dokumen arsip yang diperlukan disebabkan oleh Tidak tertatanya arsip pada dinas sosial	3	4	12	Sedang	Menyusun arsip dokumen sesuai dengan kodefikasi dan mengamankannya dari gangguan alam dan manusia	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 14	Tidak terlaksanannya sistem pemerintahan berbasis elektronik disebabkan oleh Keterbatasam sumber daya yang ada	3	4	12	Sedang	Membuat aplikasi berbasis website	Memadai	Efektif	Tidak Ada
	Terbatas dan Berkurangnya Kondisi Perlengkapan Kantor	2	4	8	Rendah	Memenuhi Kebutuhan Perlengkapan Kantor	Memadai	Efektif	Tidak Ada

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yang sudah ada (Kepatuhan/ Aturan/ SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada / Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai /Tidak memadai	Efektif/ Tidak efektif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
RSUBK 15	Tidak terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin penunjang tugas dan fungsi dinas disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	3	4	12	Sedang	Rapat evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 16	Terlambatnya proses administrasi yang membutuhkan meterai, dll disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta ketersediaan anggaran belanja jasa surat menyurat yang tidak sesuai	2	2	4	Sangat Rendah	Melakukan efisiensi dalam proses surat menyurat	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 17	Sanksi Denda / Pemutusan sambungan air, listrik, telepon / internet dan TV kabel disebabkan oleh Keterlambatan pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	4	16	Tinggi	Melakukan perhitungan ulang kebutuhan pembayaran rekening sampai akhir tahun	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 18	Kekurangan pagu anggaran pembayaran gaji THL disebabkan oleh Adanya penambahan tenaga harian lepas wakar dan tenaga kebersihan	3	4	12	Sedang	Melakukan perhitungan ulang kebutuhan pembayaran gaji THL untuk diajukan tambahan pada P-APBD	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 19	Terhambatnya aktivitas pengguna kendaraan dinas perorangan dan jabatan disebabkan oleh Pemeliharaan kerusakan yang tidak dapat diprediksi	3	4	12	Sedang	Pengecekan dan perawatan secara kontinyu peralatan tersebut	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 20	Tidak maksimalnya pelayanan di lapangan disebabkan oleh Kendaraan dinas operasional / lapangann yang tidak terpelihara	4	3	12	Sedang	Pengecekan dan perawatan secara kontinyu peralatan tersebut	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 21	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan peralatan / mesin disebabkan oleh Peralatan dan mesin yang tidak dipelihara/dirawat	3	4	12	Sedang	Pengecekan dan perawatan secara kontinyu peralatan tersebut	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 22	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya disebabkan oleh Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3	4	12	Sedang	Pengecekan dan perawatan secara kontinyu peralatan tersebut	Memadai	Efektif	Tidak Ada

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yang sudah ada (Kepatuhan/ Aturan/ SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada / Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai /Tidak memadai	Efektif/ Tidak efektif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Dipelihara/Rehabilitas								

d. Hasil Evaluasi Risiko Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Eselon IV sebagai berikut:

Tabel
Hasil Evaluasi Program, Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat	Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/ Dihindari/ Dibagi)	Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko Setelah Pengendalian			
							K	D	Skor	Level risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RSUBK 17	Sanksi Denda / Pemutusan sambungan air, listrik, telepon / internet dan TV kabel disebabkan oleh Keterlambatan pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16	Tinggi	1	Mitigasi	Melakukan perhitungan ulang kebutuhan pembayaran rekening sampai akhir tahun	1	2	2	Sangat Rendah
RSUBK 5	Kebutuhan Barang Milik Daerah pada OPD kurang terpenuhi secara maksimal	12	sedang	2	Mitigasi	Melaksanakan proses RKBMD yang lebih selektif dalam pengaqdaan Barang Milik Daerah	2	2	4	Sangat rendah
RSUBK 5	Timbulnya penyalahgunaan,keterlambatan pengembalian dan rusak atau hilang BMD yang dipinjam pakaikan	12	Sedang	2	Mitigasi	Melaksanakan perencanaan, penetausahaan,pemanfaatan,pe meliharaan,pengawasan dan pengedalian BMD sesuai dengan ketentuan hukum	2	2	4	Sangat rndah

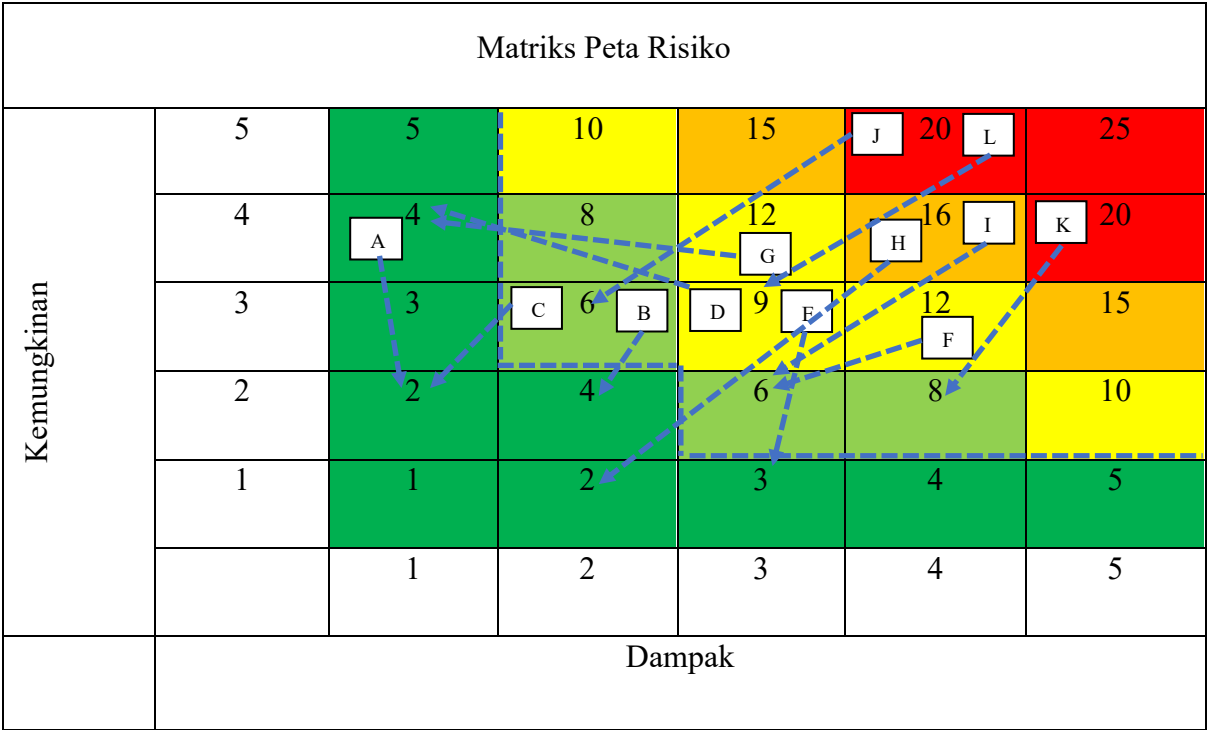
Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat	Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/ Dihindari/ Dibagi)	Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko Setelah Pengendalian			
							K	D	Skor	Level risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RSUBK 5	Laporan BMD yang tidak valid disebabkan oleh Asset yang tidak tercatat	12	Sedang	2	Mitigasi	Pengurus Barang melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara Pengeluaran dan mencatat setiap belanja asset dalam laporan barang	2	2	4	Sangat Rendah
	Laporan BMD yang tidak valid disebabkan oleh Asset yang tidak tercatat	12	Sedang	3	Mitigasi	Pengurus Barang melakukan rekonsiliasi dengan Seluruh Pengguna Barang yang terdata dan mendata ulang yang tidak terdapat didalam data	2	4	4	Sangat Rendah
RSUBK 6	Data ASN yang tidak update disebabkan oleh Belum semua data ASN terkumpul menjadi database	12	Sedang	4	Mitigasi	Surat pengantar penyerahan dokumen kepegawaian semua ASN	2	2	4	Sangat Rendah
RSUBK 13	Kehilangan dokumen arsip yang diperlukan disebabkan oleh Tidak tertatanya arsip pada dinas sosial	12	Sedang	7	Mitigasi	Menyusun arsip dokumen sesuai dengan kodefikasi dan mengamankannya dari gangguan alam dan manusia	2	3	6	Rendah
RSUBK 14	Tidak terlaksanannya sistem pemerintahan berbasis elektronik disebabkan oleh Keterbatasam sumber daya yang ada	12	Sedang	8	Mitigasi	Membuat aplikasi berbasis website	2	3	6	Rendah
RSUBK 15	Tidak terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin penunjang tugas dan fungsi dinas disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	12	Sedang	9	Mitigasi	Rapat evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	2	2	4	Sangat Rendah
RSUB K 18	Kekurangan pagu anggaran pembayaran gaji THL disebabkan oleh Adanya penambahan tenaga harian lepas wakar dan tenaga kebersihan	12	Sedang	10	Mitigasi	Melakukan perhitungan ulang kebutuhan pembayaran gaji THL untuk diajukan tambahan pada P-APBD	1	2	2	Sangat Rendah

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Level Risiko	Peringkat	Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/ Dihindari/ Dibagi)	Rencana Tindak Pengendalian	Analisis Risiko Setelah Pengendalian			
							K	D	Skor	Level risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RSUB K 19	Terhambatnya aktivitas pengguna kendaraan dinas perorangan dan jabatan disebabkan oleh Pemeliharaan kerusakan yang tidak dapat diprediksi	12	Sedang	12	Mitigasi	Pengecekan dan perawatan secara kontinyu peralatan tersebut	2	2	4	Sangat Rendah
RSUBK 20	Tidak maksimalnya pelayanan di lapangan disebabkan oleh Kendaraan dinas operasional / lapangann yang tidak terpelihara	12	Sedang	13	Mitigasi	Pengecekan dan perawatan secara kontinyu peralatan tersebut	2	2	4	Sangat Rendah
RSUBK 21	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan perlaatan / mesin disebabkan oleh Peralatan dan mesin yang tidak dipelihara/dirawat	12	Sedang	14	Mitigasi	Pengecekan dan perawatan secara kontinyu peralatan tersebut	2	2	4	Sangat Rendah
RSUBK 22	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya disebabkan oleh Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihat/Rehabilitas	12	Sedang	15	Mitigasi	Pengecekan dan perawatan secara kontinyu peralatan tersebut	2	2	4	Sangat Rendah
RSUBK 8	Kemampuan OPD yang belum dapat memenuhi kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	9	Rendah	16	Mitigasi	Penggunaan peralatan dan perlengkapan yang efektif dan efisien	2	2	4	Sangat Rendah
RSUBK 12	Perjalanan dinas yang tidak efesien dan efektif disebabkan oleh Perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan	9	Rendah	17	Mitigasi	Melakukan inventarisir jadwal undangan / kegiatan yang akan dihadiri	2	2	4	Sangat Rendah
	Terbatas dan Berkurangnya Kondisi Perlengkapan Kantor	8	Rendah	18	Mitigasi	Memenuhi Kebutuhan Perlengkapan Kantor	1	4	4	Sangat Rendah

RSUBK 7	Pencahayaannya ruangan kerja dan lingkungan kantor tidak baik disebabkan oleh Tidak tersedia komponen instalasi listrik dan penerangan	4	Sangat Rendah	19	Mitigasi	Pemeliharaan yang baik dan pengadaan alat penerangan yang berkualitas dan sesuai standar Nasional	1	2	2	Sangat Rendah
RSUBK 9	Kurang terpenuhinya Bahan Logistik Kantor disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan logistik yang dibutuhkan	4	Sangat Rendah	20	Mitigasi	Penyaluran bahan logistik yang sesuai dan tepat waktu, efektif dan efisien	1	2	2	Sangat Rendah
RSUBK 10	Tidak terpenuhinya semua Barang Cetak dan Penggandaan disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	4	Sangat Rendah	21	Mitigasi	Tanda terima penyerahan barang cetak	1	2	2	Sangat Rendah
RSUBK 11	Tidak terpenuhinya kebutuhan bahan / material pendukung kegiatan disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan material yang dibutuhkan	4	Sangat Rendah	22	Mitigasi	Menginventarisir kebutuhan bahan material secara selektif agar efektif dan efisien	1	2	2	Sangat Rendah
RSUBK 16	Terlambatnya proses administrasi yang membutuhkan meterai, dll disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta ketersediaan anggaran belanja jasa surat menyurat yang tidak sesuai	4	Sangat Rendah	23	Mitigasi	Melakukan efisiensi dalam proses surat menyurat	1	2	2	Sangat Rendah

e. Pemetaan Penanganan Program, Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan

Gambar
Matriks Pemetaan Penanganan Risiko Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan



f. Respon dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Program, Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan eselon IV sesuai dengan Tabel berikut:

Tabel
Rencana Tindak Pengendalian Risiko Program, Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko	Skor	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
RSUBK 5	Laporan BMD yang tidak valid	12	Mitigasi	Penyusunan rekapitulasi belanja modal yang menjadi asset Dinas Sosial per triwulan	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 6	Data ASN yang tidak update	12	Mitigasi	Memaksimalkan penggunaan aplikasi My SAPK	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 7	Pencahayaan ruangan kerja dan lingkungan kantor tidak baik	4	Diteirma	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Maret;Juli;Nopember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 8	Kemampuan OPD yang belum dapat memenuhi kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9	Mitigasi	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Januari, Maret	Sekretaris/PPTK

Kode Risiko	Risiko	Skor	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
RSUBK 9	Kurang terpenuhinya Bahan Logisti Kantor	4	Diteirma	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Maret;Juni;September; Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 10	Tidak terpenuhinya semua Barang Cetakan dan Penggandaan	4	Diteirma	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 11	Tidak terpenuhinya kebutuhan bahan / material pendukung kegiatan	4	Diteirma	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 12	Perjalanan dinas yang tidak efesien dan efektif	9	Mitigasi	Membuat kartu kendali perjalanan dinas	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 13	Kehilangan dokumen arsip yang diperlukan	12	Mitigasi	Pendampingan dari Dinas Kearsipan dalam pengelolaan arsip	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 14	Rendahnya kualitas pelayanan	12	Mitigasi	Menugaskan staaf untuk mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas SDM terkait pemanfaatan IT	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 15	Tidak terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin penunjang tugas dan fungsi dinas	12	Mitigasi	Membuat Rencana Kebutuhan Barang dan Mesin	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 16	Terlambatnya proses administrasi yang membutuhkan meterai, dll	12	Diteirma	Penggunaan bahan surat dan benda pos secara efesien	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 17	Sanksi Denda / Pemutusan sambungan air, listrik, telepon / internet dan TV kabel	16	Mitigasi	Melakukan perhitungan ulang kebutuhan sampai akhir tahun	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 18	Kekurangan pagu anggaran pembayaran gaji THL	12	Mitigasi	Memastikan ketersediaan dana untuk pembayaran gaji THL	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 19	Terhambatnya aktivitas pengguna kendaraan dinas perorangan dan jabatan	12	Mitigasi	Membuat kartu kendali perbaikan / perawatan kendaraan	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 20	Tidak maksimalnya pelayanan di lapangan	12	Mitigasi	Membuat kartu kendali perbaikan / perawatan kendaraan	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 21	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan peralatan / mesin	12	Mitigasi	Membuat kartu kendali perbaikan / perawatan peralatan dan mesin	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 21	Pelayanan ASN yang tidak optimal	16	Mitigasi	Surat kepada rekanan unrtuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak perjanjian	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 22	Pelayanan ASN yang tidak optimal	16	Mitigasi	Surat kepada rekanan unrtuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak perjanjian	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK

g. Pemantauan Risiko

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Tidak Pengendalian Risiko Program, Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Tabel berikut :

Tabel
Pemantauan RTP Risiko Program, Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan
eselon IV

No	Rencana Tindak Pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan												Pelaksana Pengendalian (Pihak yang melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko / Penanggungjawab Risiko
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Optimalisasi Peran ASN													Sekretaris / PPTK	Kepala Dinas
2	Optimalisasi Potensi Barang Milik Daerah													Sekretaris / PPTK	Kepala Dinas
3	Memastikan kesiapan Tim													Sekretaris / PPTK	Kepala Dinas
4	Optimalisai Kerjasama													Sekretaris / PPTK	Kepala Dinas
5	Melakukan proses													Sekretaris / PPTK	Kepala Dinas

Keterangan : (Warna Hijau rencana pelaksanaan)
(Warna Kuning Realisasi pelaksanaan)

h. Pelaksanaan dan Hambatan dalam Pengendalian Risiko

Tabel
Pelaksanaan Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan eselon IV
Tahun 2025

No	Rencana Tindak Pengendalian Risiko	Tanggal Pelaksanaan	Keterjadian Risiko (Ya/Tidak)	Ouput Kegiatan Pengendalian	Hambatan/ Permasalahan dalam pelaksanaan pengendalian/ Risiko sisa yang belm dapat dikendalikan	Upaya telah dilakukan dalam penanganan risiko sisa
1	Optimalisasi Peran ASN	Februari – September 2025	Tidak	Melakukan Kegiatan – Kegiatan		
2	Optimalisasi Potensi Barang Milik Daerah	Februari – September 2025	Tidak	Melakukan Pendataan Barang Milik Daerah		
3	Memastikan kesiapan Tim	Februari – September 2025	Tidak	Pembagiaan Peran Kegiatan ASN		
4	Optimalisai Kerjasama	Februari – September 2025	Tidak	Koordinasi Belanja pada Pihak Ketiga		
5	Melakukan proses	Februari – September 2025	Tidak	Proses Seluruh Kegiatan		

Hambatan/kendala dalam pelaksanaan Program, Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 yang belum teridentifikasi dalam Daftar Risiko.
Hambatan (Perangkat Daerah) dalam pelaksanaan Program, Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan Esselon IV

No	Rencana Tindak Pengendalian Risiko	Tanggal Pelaksanaan	Keterjadian Risiko (Ya/Tidak)	Ouput Kegiatan Pengendalian	Hambatan/ Permasalahan dalam pelaksanaan pengendalian/ Risiko sisa yang belm dapat dikendalikan	Upaya telah dilakukan dalam penanganan risikosisa
1	Optimalisasi Peran ASN	Januari – Maret 2025	Tidak	Melakukan Kegiatan – Kegiatan		
2	Optimalisasi Potensi Barang Milik Daerah	Januari – Maret 2025	Tidak	Melakukan Pendataan Barang Milik Daerah		
3	Memastikan kesiapan Tim	Januari – Maret 2025	Tidak	Pembagiaan Peran Kegiatan ASN		
4	Optimalisai Kerjasama	Januari – Maret 2025	Tidak	Koordinasi Belanja pada Pihak Ketiga		
5	Melakukan proses	Januari – Maret 2025	Tidak	Proses Seluruh Kegiatan		

i. Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025

Capaian Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC / C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik Risiko / Penanggungjawab / Pihak yang terkena dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	82	2.930.136.562,00							
1	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			121.140.500,00							
1.1	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	12.500.00,00	RSUBK 5	Laporan BMD yang tidak valid	Asset yang tidak tercatat	Ekseternal dan Internal	UC	Pemerintah Daerah Kesulitan Konsolidasi Laporan Keuangan	Sekretaris / PPTK

1.2	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,00		Laporan BMD yang tidak valid	Asset yang tidak tercatat	Internal dan Eksternal	UC/C	Pemerintah Daerah Kesulitan Konsolidasi Laporan Keuangan	Sekretaris / PPTK
1.3	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	36.900.000,00		Laporan BMD yang tidak valid	Asset yang tidak tercatat	Internal dan Eksternal	UC/C	Pemerintah Daerah Kesulitan Konsolidasi Laporan Keuangan	Sekretaris / PPTK
1.4	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	46.740.500,00		Laporan BMD yang tidak valid	Asset yang tidak tercatat	Internal dan Eksternal	UC/C	Pemerintah Daerah Kesulitan Konsolidasi Laporan Keuangan	Sekretaris / PPTK
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			19.364.800,00							
2.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	19.364.800,00	RSUBK 6	Belum semua data ASN terkumpul menjadi database	Keterlambatan proses pengadaan permakanan	Internal	C	Tidak Dapat Meningkatkan SDM	Sekretaris / PPTK

3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			774.861.401,00							
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah barang	5 Paket	5.110.200,00	RSUBK 7	Pencapaian ruangan kerja dan lingkungan kantor tidak baik	Tidak tersedia komponen instalasi listrik dan penerangan	Internal	C	Tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik	Sekretaris / PPTK
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	20 Paket	64.774.506,00	RSUBK 8	Kemampuan OPD yang belum dapat memenuhi kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	Internal	C	Tidak terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Sekretaris / PPTK
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	155.886.225,00	RSUBK 9	Perhitungan Kurang terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan logistik yang dibutuhkan	Internal	UC	Kondisi PMKS yang semakin memburuk	Sekretaris / PPTK

3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	3 Paket	339.194.710,00	RSUBK 10	Tidak terpenuhinya semua Barang Cetak dan Penggandaan	Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	Internal	C	Tidak terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan	Sekretaris / PPTK
3.5	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Barang	2 Paket	61.802.500,00	RSUBK 11	Tidak terpenuhinya kebutuhan bahan / material pendukung kegiatan	Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan material yang dibutuhkan	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan acara yang memerlukan bahan / material	Sekretaris/PPTK
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan	200 Laporan	94.551.660,00	RSUBK 12	Perjalanan dinas yang tidak efisien dan efektif	Perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan	Internal	C	Pemborosan penggunaan anggaran	Sekretaris/PPTK
3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip	50 Dokumen	13.541.600,00	RSUBK 13	Kehilangan dokumen arsip yang diperlukan	Tidak tertatanya arsip pada dinas sosial	Internal	C	Kesulitan dalam pencarian dokumen arsip yang diperlukan	Sekretaris/PPTK
3.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	RSUBK 14	Tidak terlaksanannya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Keterbatasan sumber daya yang ada	Internal	C	Masih kurangnya akses pelayanan kepada masyarakat karena masih dilakukan secara manual	Sekretaris/PPTK

4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"			101.439.134,00							
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang	10 Unit	101.439.134,00	RSUBK 15	Tidak terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin penunjang tugas dan fungsi dinas	Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	Internal	C	Tidak maksimalnya kinerja ASN	Sekretaris/PPTK
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.312.888.327,00							
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah barang berupa meterai dan kertas cover	1 Laporan	2.299.000,00	RSUBK 16	Terlambatnya proses administrasi yang membutuhkan meterai, dll	Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta ketersediaan anggaran belanja jasa surat menyurat yang tidak sesuai	Internal	C	Terhambatnya proses surat-menyurat kantor	Sekretaris/PPTK

5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	316.485.288,00	RSUBK 17	Sanksi Denda / Pemutusan sambungan air, listrik, telepon / internet dan TV kabel	Keterlambatan pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internal	C	Terhambatnya aktivitas / pelayanan / kebutuhan kantor	Sekretaris/PPTK
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	994.104.039,00	RSUBK 18	Kekurangan pagu anggaran pembayaran gaji THL	Adanya penambahan tenaga harian lepas wakar dan tenaga kebersihan	Internal	C	Kinerja Pegawai Non PNS Kurang Maksimal	Sekretaris/PPTK
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			630.442.400,00							
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan Pajak	33 Unit	150.000.000,00	RSUBK 19	Terhambatnya aktivitas pengguna kendaraan dinas perorangan dan jabatan	Pemeliharaan kerusakan yang tidak dapat diprediksi	Internal	C	Minimnya Kendaraan Dinas Jabatan untuk menunjang Tufoksi OPD	Sekretaris/PPTK
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan	5 Unit	150.000.000,00	RSUBK 20	Tidak maksimalnya pelayanan di lapangan	Kendaraan dinas operasional / lapangan yang tidak terpelihara	Internal	C	Minimnya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk menunjang Tufoksi OPD	Sekretaris/PPTK

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak									
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan alat dan mesin	12 Unit	75.000.000,00	RSUBK 21	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan perlaatan / mesin	Peralatan dan mesin yang tidak dipelihara/dirawat	Internal	C	kerusakan peralatan dan mesin	Sekretaris/PPTK
6.4	Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihat/Rehabilitas	2 Unit	227.412.400,00	RSUBK 22	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihat/Rehabilitas	Internal	C	kerusakan fasilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretaris/PPTK
6.5	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	28.030.000,00	RSUBK 23	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Internal	C	kerusakan peralatan dan mesin Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretaris/PPTK

BAB VII PENUTUP

Demikian Laporan Akhir Pengelolaan Risiko Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara disampaikan Kepada Bupati Kutai Kartanegara sebagai bahan masukan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara



Drs. Yulandris Suherdian
NIP. 19680708 199403 1013

Lampiran Laporan Pengelolaan Risiko Eselon II

Daftar Dokumen Hasil Pelaksanaan RTP Risiko

No	Kode Risiko	Nama Dokumen pelaksanaan RTP
1	RS 1	<div>1. SOP DTKS</div> <div>2. Kegiatan Sosialisasi dan pelatihan kepada petugas lapangan terkait entry data / updating data pada aplikasi SIKS-NG</div> <div>3. Data terbaru tentang Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar</div> <div>4. Rapat Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian</div>
2	RS 2	<div>1. SK Tim Evaluasi Internal SAKIP</div> <div>2. Penilaian Mandiri SAKIP</div> <div>3. Rapat Evaluasi Kinerja</div>